

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT**

**(Studi pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 - 2022)**



Diajukan oleh
Widya Lupita
22919052

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT**

**(Studi pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 - 2022)**

**Tesis S-2
Program Magister Akuntansi**



Diajukan oleh
Widya Lupita
22919052

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

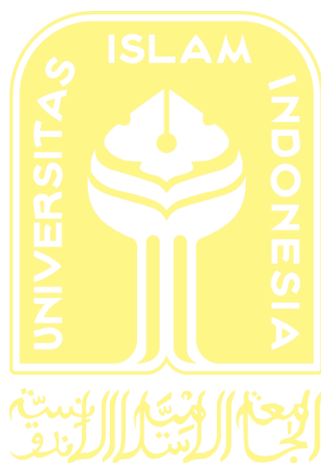
“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pascasarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 19 Maret 2025



Widya Lupita

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

WIDYA LUPITA

No. Mhs. : 22919052

Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan

Dengan Judul:

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA DAN KABUPATEN
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 - 2022)**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

Penguji II



Dr. Mahmudi, S.E., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

MOTTO

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.”

- Aristoteles -

“Investasi paling penting yang bisa kamu lakukan adalah untuk dirimu sendiri.”

- Warren Buffett -

“Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar.

Orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah.”

- Susi Pudjiastuti -

“Bekerjalah dua atau tiga kali lebih banyak dari orang lain, karena usaha tidak pernah membohongi hasil.”

- Chairul Tanjung -

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 - 2022)**”. Tujuan penulisan tesis ini yaitu sebagai syarat menyelesaikan studi Program Studi Pascasarjana Magister Akuntansi sehingga dapat memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Pada proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan semangat dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kontribusi itulah yang membuat tesis ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan tepat waktu. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Keluarga penulis, Bapak Iswadi dan Ibu Sumiyati selaku orang tua penulis, M.Y. Danar Aprilawanda dan Ina Wijayanti selaku kakak penulis, dan Raka Wijaya Iswa selaku adik penulis, yang sudah memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan dari awal hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberi dukungan dalam penyelesaian studi ini.
3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan FBE UII yang telah memberi dukungan dalam penyelesaian studi ini.
4. Bapak Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com(IS), Ph.D., CFrA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi FBE UII yang telah memberi dukungan dalam penyelesaian studi ini.

5. Bapak Arief Rahman, SIP., SE., M.Com.,Ph.D., Cert D.A. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Magister FBE UII sekaligus sebagai dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan kepada penulis dari awal hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sampai selesai.
6. Kolega, rekan dan partner kerja Departemen Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM yang selalu memberikan harapan, dukungan, dorongan selama proses perkuliahan hingga selesai.
7. Teman-teman Magister Akuntansi UII Angkatan 26 yang sudah kebersamai dan selalu memberikan semangat sehingga baik proses perkuliahan maupun penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Teman-teman UNY yang selalu memberikan dukungan dalam proses perkuliahan hingga selesai.

Akhir kata, penulis mengucapkan mohon maaf atas kesalahan penulis baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja diperbuat selama berkuliah di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII maupun selama proses penulisan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan semua pihak termasuk memberikan pengetahuan masyarakat luas.

Yogyakarta, 19 Maret 2025

Penulis



Widya Lupita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BERITA ACARA UJIAN TESIS	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
Abstract.....	xv
Abstrak.....	xv
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II <u>K</u> AJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12

2.1.1	Teori Keuangan Publik	12
2.1.2	Teori Stewardship	16
2.1.3	Konsep Standar Akuntansi Pemerintah	19
2.1.4	Laporan Keuangan Daerah	21
2.1.5	Kinerja Keuangan Daerah.....	23
2.1.6	Analisis Rasio Keuangan	24
2.2	Hasil Penelitian Terdahulu	28
2.3	Hipotesis Penelitian.....	38
2.4	Kerangka Penelitian	46
BAB III METODE PENELITIAN		47
3.1	Definisi Operasional Variabel.....	47
3.1.1	Variabel Independen	47
3.1.2	Variabel Dependen.....	48
3.2	Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	49
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian	50
3.4	Metode Pengumpulan Data	50
3.5	Metode Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		54
4.1.	Data Penelitian	54
4.2.	Analisis Deskriptif.....	55
4.3.	Analisis Regresi Data Panel	62

4.4. Pengujian Hipotesis.....	63
4.5. Pembahasan.....	69
BAB V_KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1. Kesimpulan.....	71
5.2. Keterbatasan Penelitian	72
5.3. Implikasi Penelitian.....	72
5.4. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data perbandingan IPM Jawa Tengah dengan IPM Nasional Tahun 2017-2012.....	6
Tabel 2. 1 Kategori Interpretasi Indeks Pembangunan Manusia	28
Tabel 2.2 Penelitian yang Revelan dan Terdahulu	31
Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	55
Tabel 4. 2 Pengujian Model	62
Tabel 4. 3 Pengujian Hipotesis.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Provinsi paling Miskin di Jawa Tahun 2024	4
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	46
Gambar 4. 1 Persentase Distribusi Frekuensi Derajat Desentralisasi Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022.....	56
Gambar 4. 2 Persentase Distribusi Frekuensi Efektivitas PAD Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022	58
Gambar 4.3.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	84
Lampiran 2. Rata-Rata IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada Tahun 2017-2022	86
Lampiran 3. Rincian Data Efektivitas PAD Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022.....	88
Lampiran 4. Rincian Data Serapan Anggaran Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022.....	98
Lampiran 5. Rincian Data IPM Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022.....	107
Lampiran 6. Hasil Uji Chow	114
Lampiran 7. Hasil Uji Hausman	115

Abstract

The government's role in improving HDI is strongly influenced by regional financial performance in the hope of encouraging an increase in overall community welfare. The purpose of this study was to analyze the effect of local government financial performance on community welfare in city and district local governments in Central Java province in 2017-2022. Financial performance analysis is seen from the ratio of the degree of decentralization, the effectiveness of local revenue, budget absorption and public welfare seen from the HDI indicator. The data analysis method used is descriptive statistics by providing a description of the data involved in this study. In addition, using panel data analysis with fixed effect models and e-views software. The results showed that the degree of decentralization and budget absorption had a positive and significant effect, while the effectiveness of local revenue had no effect on the human development index of city and district local governments in Central Java province in 2017-2022. The implications of this research can be used as a guideline to improve the planning process and preparation of financial performance, as well as to improve the quality of local government finances, which ultimately contributes to improving the welfare of the community.

Keywords: Decentralization, Effectiveness of Local Revenue, Budget Absorption, Human Development Index

Abstrak

Peran pemerintah dalam meningkatkan IPM sangat dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah dengan harapan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat pada pemerintah daerah kota dan kabupaten di provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2022. Analisis kinerja keuangan dilihat dari rasio derajat desentralisasi, efektivitas pendapatan asli daerah, serapan anggaran dan kesejahteraan masyarakat dilihat dari indikator IPM. Metode analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif dengan memberikan deskripsi mengenai data-data yang terkait dalam penelitian ini. Selain itu, menggunakan analisis data panel dengan *fixed effect model* dan software *e-views*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi dan serapan anggaran berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan untuk efektivitas pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada pemerintah daerah kota dan kabupaten di provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2022. Implikasi dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk memperbaiki proses perencanaan dan penyusunan kinerja keuangan, serta untuk meningkatkan kualitas keuangan pemerintah daerah, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci : Desentralisasi, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Serapan Anggaran, Indeks Pembangunan Manusia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dimana daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom memberikan ruang pada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri kebijakannya supaya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Daerah otonom diharapkan mampu memperkuat keberadaan masing-masing daerah dalam hal menyelesaikan masalah lokal dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Tujuannya untuk mengembangkan demokratisasi dan memperkuat keberadaan masyarakat pada setiap daerah. Hal ini mengacu pada kebijakan pemerintah dalam memperkuat kemampuan dan tanggung jawab daerah. Pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah provinsi dalam mengatur daerah otonom. Dalam konteks ini, pemerintah provinsi memberikan dukungan dan melakukan koordinasi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

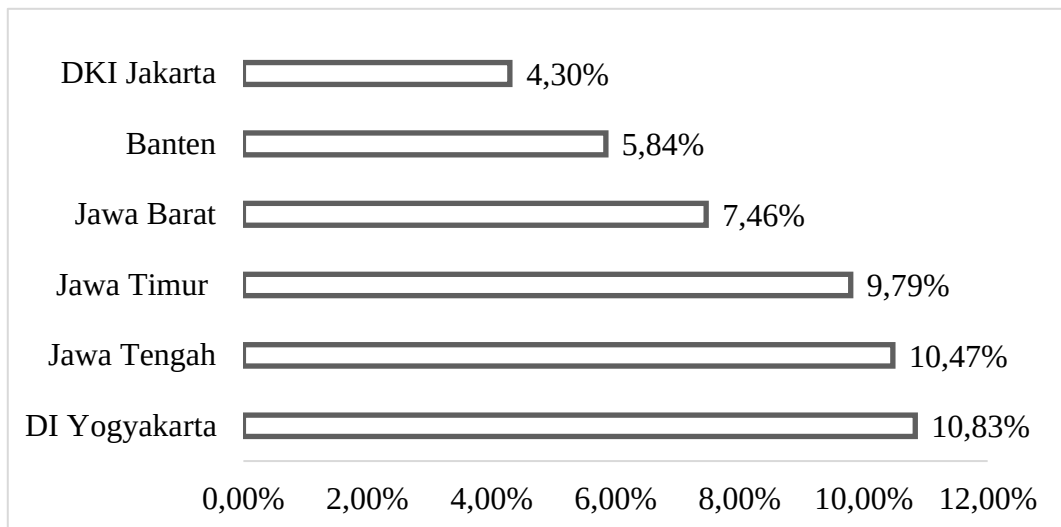
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah daerah diharapkan mampu menyampaikan laporan keuangan daerah dengan baik. Penyampaian laporan keuangan daerah merupakan wujud tanggungjawab pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya. Laporan keuangan yang baik diharapkan dapat dipercaya, sistematis, reliabel dan dapat dipahami. Menurut Mahmudi (2019) laporan keuangan digunakan sebagai pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan

secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Reformasi akuntansi sektor publik menghasilkan perubahan krusial dalam pelaporan akuntansi oleh pemerintah, yaitu penerapan akuntansi akrual di sektor publik (Aswar et al., 2021). Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, maka telah mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi publik. Menurut Darwis et al., (2022) akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berhasil tidaknya pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan keuangan pemerintah daerah bukan merupakan alat akuntabilitas utama terhadap masyarakat, namun laporan keuangan tersebut disusun dengan cara yang sebanding dan seragam sesuai dengan undang-undang akuntansi yang berlaku (Haustein & Lorson, 2021). Pelaporan keuangan pemerintah disiapkan untuk tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan dan ditujukan kepada berbagai pengguna, termasuk masyarakat (Cohen et al., 2022). Tujuan paling penting dari informasi akuntansi sektor publik adalah untuk mengaktifkan dan meningkatkan pengawasan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (mungkin pemerintah pusat) daripada sebagai informasi untuk akuntabilitas publik kepada masyarakat eksternal (Zhang, 2022). Transparansi keuangan dicapai melalui pengungkapan informasi secara aktif mengenai transaksi ekonomi yang mendasari organisasi dengan cara yang mudah dipahami oleh mereka yang menggunakan informasi tersebut (Krah & Mertens, 2020). IASB melibatkan kerangka komprehensif standar yang memenuhi persyaratan pembuktian pendapatan dan menghilangkan kesenjangan dalam praktik akuntansi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan beberapa karakteristik kualitatif data. Karakteristik tersebut menjadi indikator kualitas laporan keuangan, termasuk (relevansi, representasi setia, komparabilitas, keandalan, pemahaman dan materialitas) (Salameh et al., 2022).

Menurut Widiyanto & Isnawati (2023) pemerintah daerah harus memenuhi tuntutan publik dengan menyediakan laporan keuangan yang secara akurat meninjau hasil aktual dibandingkan proyeksi, mengevaluasi kinerja, dan memeriksa kepatuhan terhadap peraturan. Kualitas laporan yang baik dan akurat menunjukkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah sehingga dapat mempengaruhi penilaian kinerja keuangan. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinilai menggunakan rasio keuangan, seperti desentralisasi, efektivitas pendapatan asli daerah, dan serapan anggaran. Rasio keuangan merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk membandingkan kinerja ekonomi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan dapat memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai pengelolaan keuangan dan kelancaran operasional pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat membantu dalam menentukan strategi pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien, serta memperbaiki kinerja ekonomi. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat sebagai tolak ukur dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada dengan melakukan kegiatan untuk menunjang pembangunan daerah. Menurut Gian & Arif (2022) kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat seperti dari tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan indeks pembangunan manusia.

Kemiskinan di Indonesia telah menjadi masalah nasional. Dilansir dari kompas.com (Putri, 2024) Jawa Tengah telah menjadi isu nasional karena menduduki peringkat kedua dari daftar provinsi paling miskin setelah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut bagan daftar provinsi paling miskin di Pulau Jawa pada tahun 2024.



Sumber : Kompas.com

Gambar 1.1

Data Provinsi paling Miskin di Jawa Tahun 2024

Menurut BPS, Jawa Tengah memiliki persentase penduduk miskin mencapai 10,47 persen pada Maret 2024. Angka tersebut terpantau turun dari 10,77 persen pada Profil Kemiskinan Indonesia periode Maret 2023. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 3.704.330 orang, turun dari 3.791.500 pada Maret 2023. Hal ini sejalan dengan penelitian (Sari et al., 2023) yang menyatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah termasuk wilayah dengan kemiskinan cukup tinggi pada periode tahun 2020 sebesar 11,09 persen, tertinggi kedua di Pulau Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh faktor pendidikan (angka putus sekolah), ekonomi (angka pengangguran), lokasi (jarak tempat tinggal ke pusat kota), ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto dan inflasi) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas SDM, mempermudah investasi, meningkatkan sektor unggulan, menstabilkan upah, dan memberi bantuan pendidikan merupakan cara yang kemungkinan dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS, Provinsi Jawa

Tengah memiliki jumlah penduduk paling banyak kedua di Pulau Jawa. Jumlah penduduk di Jawa Tengah 37.540.962 jiwa.

Kemiskinan dapat menyebabkan tingkat kemakmuran masyarakat tidak maksimal sedangkan tujuan akhir dari pembangunan yaitu untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Jika angka kemiskinan di suatu daerah tinggi maka akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Pendapatan masyarakat berkurang sehingga daya beli masyarakat menurun, pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia juga tidak dapat tercukupi (Trisno et al., 2022). Hal ini sejalan daripada manfaat dari indeks pembangunan manusia sebagai acuan dalam penilaian kesejahteraan masyarakat mulai dari pendidikan, kesehatan hingga pendapatan masyarakatnya, dimana program-program pemerintah daerah yang ada dapat meningkatkan indikator tersebut. Sebuah daerah dikatakan berkembang, maju ataupun terbelakang dapat dilihat dari IPMnya. Indikasi keberhasilan pembangunan manusia dapat mengatasi permasalahan yang ada pada masyarakat tersebut. Selain digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga digunakan sebagai salah satu alokator dana alokasi umum, oleh sebab itu indeks pembangunan manusia bagi Indonesia dapat dikatakan sebagai data yang strategis (Sari & Riharjo, 2020).

BPS mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah pada tahun 2017 sebesar 70,52% dan terus mengalami tren kenaikan hingga tahun 2022. Seiring tren kenaikan tersebut, IPM di Provinsi Jawa Tengah ternyata tidak lebih tinggi dibandingkan IPM Nasional di Indonesia. Berikut data perbandingan antara IPM Jawa Tengah dengan IPM Nasional pada tahun 2017-2022.

Tabel 1.1

Data perbandingan IPM Jawa Tengah dengan IPM Nasional Tahun 2017-2012

Tahun	IPM Jawa Tengah	IPM Nasional
2017	70,52	70,81
2018	71,12	71,39
2019	71,73	71,92
2020	71,78	71,94
2021	72,16	72,29
2022	72,79	72,91

Sumber : BPS, 2024

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator strategis yang sering digunakan untuk melihat upaya dan hasil program pembangunan di suatu daerah secara keseluruhan (Rindiyanı & Mubaraq, 2023). Indeks Pembangunan Manusia mempunyai tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak (BPS, 2024). Data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah dapat dilihat pada lampiran 1.

Tabel lampiran 1 merupakan tabel Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah. Data tersebut berisi persentase IPM selama tahun 2017-2022 yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah. Besaran IPM tersebut juga sangat variatif. Dapat dilihat juga untuk data pada lampiran 2 mengenai rata-rata indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah pada Tahun 2017-2022.

Tabel pada lampiran 2 menunjukkan rata-rata IPM pada tahun 2017-2022 Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dapat dilihat bahwa kesenjangan yang cukup jauh diantara pemerintah daerah dengan IPM terendah dan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang menduduki peringkat pertama dengan IPM sebesar 83,10 dengan kategori sangat tinggi, sedangkan Kabupaten Brebes berada di peringkat terakhir dengan IPM sebesar 66,00 dengan kategori sedang. Harapannya,

pemerataan pembangunan dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antar kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sehingga diperlukan beberapa program guna meminimalisasi tingkat fluktuasinya dan dengan demikian pembangunan manusia dapat lebih stabil. Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan pun terabaikan. Hal tersebut menjadikan kesenjangan pembangunan manusia di antara keduanya pun menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasi dengan baik. Pemerintah memiliki peran penting untuk lebih memprioritaskan pembangunan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai indeks Pembangunan manusia yang tinggi.

Hasil penelitian Hamimah & Zulkarnain (2020) menunjukkan bahwa secara parsial rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio efektivitas PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sedangkan rasio belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Periode pengamatan tersebut berlangsung tahun 2014-2018, sehingga perlu adanya pembaharuan penelitian saat pandemi bahkan setelah pandemi covid-19. Selang dua tahun, terdapat penelitian Sahlan et al., (2022) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (Variabel X) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Variabel Y). Penelitian ini berada di Kabupaten Bima, sehingga untuk penelitian berikutnya diperlukan populasi yang lebih luas dengan variabel kinerja keuangannya yang lainnya. Pada tahun yang sama, terdapat penelitian Rahma et al., (2022) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa kemandirian fiskal, efektivitas Pendapatan Asli Daerah, keserasian belanja dan pertumbuhan

ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan pengaruh yang paling besar terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian dilakukan di pemerintah daerah Kabupaten Bombana tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 sehingga perlu dilakukan penelitian dengan perkembangan tahun terbaru dengan populasi yang lebih luas.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia merupakan tolak ukur yang dapat digunakan dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Selain itu, diperlukan penelitian dengan perkembangan tahun terbaru dan populasi yang dapat merepresentasikan dari masalah yang ada. Dengan demikian, peneliti mengangkat topik penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan ini diukur dengan rasio derajat desentralisasi, efektivitas pendapatan asli daerah, dan serapan dana. Sedangkan yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat ialah Indeks Pembangunan Manusia. Peneliti mengangkat tema penelitian pada tahun 2017-2022. Pemilihan tahun penelitian didasarkan pada tahun terkini yang paling memungkinkan terkait ketersediaan data dan kondisi yang paling merepresentasikan pada keadaan saat ini. Selain itu, peneliti mengambil populasi dengan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan permasalahan adanya kemiskinan yang dibuktikan oleh data-data diatas hingga menyebabkan terhambatnya pembangunan manusia. Hal itu juga tercermin bahwa IPM yang dicapai oleh Provinsi Jawa Tengah masih dibawah IPM Nasional Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki proses penyusunan dan perencanaan kinerja keuangan pemerintah daerah dan meningkatkan kualitas

keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi utama dalam bidang administrasi publik dan manajemen sumber daya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022 ?
2. Bagaimana pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022 ?
3. Bagaimana pengaruh Serapan Anggaran terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022.
2. Menganalisis pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022.

3. Menganalisis pengaruh Serapan Anggaran terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut, diharapkan hasil dari penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

- 1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan informasi analisis terkait dengan pengaruh desentralisasi, efektivitas pendapatan asli daerah, dan serapan anggaran terhadap indeks pembangunan manusia tahun 2017-2022 pada kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

- 2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pengambilan keputusan terkait dengan persepsi desentralisasi, efektivitas pendapatan asli daerah, serapan anggaran dalam mewujudkan indeks pembangunan manusia yang baik.
- b. Membantu memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di masa yang akan datang.

- 3 Manfaat Akademis

- a. Memberikan kajian secara akademik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia.
- b. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan penelitian yang mengangkat topik yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut merupakan sistematika penulisan pada penelitian ini:

BAB I Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Bagian ini mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian, termasuk penjelasan dari penelitian terdahulu yang relevan. Bagian ini juga membahas tentang kerangka dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan mengenai definisi operasional variabel, jenis dan teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Pembahasan

Bagian ini menjelaskan data-data hasil penelitian yang digambarkan melalui analisis deskriptif dan pengujian hipotesis.

BAB V Penutup

Bagian ini menjelaskan mengenai kesimpulan, implikasi, dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keuangan Publik

Menurut Batin (2022) keuangan publik adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas keuangan pemerintah. Bidang ini juga mempertimbangkan struktur negara dan sistem pemerintahan yang ada. Secara fundamental, keuangan publik berfokus untuk membiayai kegiatan operasional negara dan konsentrasinya untuk kepentingan masyarakat luas. Selain itu, keuangan publik memiliki hubungan yang kuat dengan proses pengambilan keputusan yang berbasis demokrasi. Keuangan publik tidak hanya mencerminkan upaya pemerintah dalam mengumpulkan sumber dana, tetapi juga bagaimana dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas (Ghazali, 2023).

Karakteristik Kebijakan Publik

Menurut Batin (2022) fungsi mekanisme pasar diatur, diubah, dan dilengkapi oleh karakteristik kebijakan publik. Berikut adalah ciri-cirinya:

- a. Untuk mencapai efisiensi pasar
- b. Peraturan pemerintah harus dibuat untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi
- c. Pemerintah harus membuat peraturan dan perlindungan untuk melindungi pelaku pasar
- d. Pemerintah harus mengatasi masalah eksternalitas melalui kebijakan pajak, anggaran, subsidi, dan kebijakan pemerintah lainnya

- e. Pemerintah harus melakukan peran sosial dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan dalam mekanisme pasar
- f. Kebijakan publik harus dibuat untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke pasar yang aman

Ruang Lingkup Keuangan Publik

Menurut Batin (2022) lingkup keuangan publik mencakup analisis mengenai kondisi dan alasan kehadiran pemerintah dalam bidang perekonomian, antara lain:

- a. Terdapatnya eksternalitas dari aktivitas suatu pihak yang memengaruhi pihak lainnya dan memerlukan pengendalian.
- b. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang publik.
- c. Perlunya intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar untuk mencapai stabilitas ekonomi, terutama dalam hal kestabilan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.

Selanjutnya, pembahasan tentang keuangan publik mencakup isu-isu terkait penciptaan dan pengumpulan pendapatan oleh pemerintah. Pendapatan pemerintah dapat berasal dari pajak maupun nonpajak, dan dalam konteks keuangan publik, sumber-sumber ini akan dikaitkan dengan aspek keadilan serta distribusi pendapatan.

Keuangan publik menjelaskan dan menganalisis layanan pemerintah, subsidi, dan pembayaran kesejahteraan, serta metode yang digunakan untuk menutupi pengeluaran untuk tujuan tersebut melalui perpajakan, pinjaman, bantuan asing, dan penciptaan uang baru. Pemerintah menanggung biaya kegiatan ini terutama melalui pungutan (pajak) yang tingkat keparahannya bagi setiap

rumah tangga atau perusahaan bisnis umumnya sedikit bergantung jika sama sekali pada jumlah layanan, subsidi, atau pembayaran kesejahteraan yang diterima rumah tangga atau perusahaan tersebut. Akibatnya, pengguna dan penerima tidak dapat memberi sinyal preferensi mereka terhadap suatu layanan dengan menaikkan harganya dan penjatahan sejumlah total layanan tertentu di antara pengguna potensial harus dilakukan dengan cara lain selain penetapan harga. Di sisi lain, uang dan penetapan harga digunakan ketika pemerintah melibatkan tenaga kerja atau layanan faktor lainnya atau membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Layanan pemerintah yang diberikan kepada rumah tangga dan perusahaan memengaruhi aktivitas ekonomi mereka, dan dapat dinilai dengan kriteria yang sama tentang ekuitas, efisiensi, dan sejenisnya yang telah diterapkan secara intensif pada ukuran pendapatan (Shoup, 2017). Menurut Ghazali (2023) keuangan publik dalam konteks kenegaraan dijelaskan sebagai seluruh kegiatan pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber pendapatan untuk mendapatkan dana. Dana-dana ini kemudian dimanfaatkan untuk mencapai berbagai tujuan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya.

Dampak dari Tindakan Keuangan Publik

Menyatakan dampak dari tindakan keuangan publik berarti membuat perbandingan antara apa yang ada dan apa yang akan terjadi jika tindakan tersebut tidak berlaku. Atau, perbandingan antara apa yang ada, tanpa tindakan keuangan publik, dan apa yang akan terjadi jika tindakan tersebut berlaku. Atau, jika periode mendatang ditentukan, perbandingannya adalah antara dua prakiraan. Dalam hal apa pun, perbandingan tersebut melibatkan setidaknya satu keadaan hipotetis

yang, karena bersifat hipotetis, tidak dapat diamati. Tidak ada definisi operasional yang dapat digunakan, meskipun teknik ekonometrik terkadang dapat mengekstrak informasi yang mendekati apa yang mungkin diamati jika suatu eksperimen dapat dilakukan, dengan semua hal lain benar-benar tidak berubah. Kesulitan analitis yang hebat ini disertai dengan masalah konseptual, yaitu menyatakan dengan tepat pertanyaan yang harus dijawab, termasuk, khususnya, spesifikasi tentang hal-hal lain apa yang dianggap tetap konstan, atau tindakan alternatif apa yang digunakan sebagai dasar perbandingan (Shoup, 2017).

Menurut Jaelani & Hanim (2020) definisi di atas menunjukkan bahwa istilah "keuangan publik" sering kali dikaitkan dengan konsep keuangan negara, ekonomi publik, dan ekonomi sektor publik. Dalam arti yang lebih luas, istilah "publik" tidak hanya merujuk pada aktivitas pemerintah, tetapi juga mencakup "utilitas" yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, serta kegiatan dari organisasi amal. Dalam konteks yang lebih sempit, "keuangan publik" dapat diartikan sebagai "keuangan pemerintah," yang mencakup semua aktivitas pemerintah dalam mencari dan mengelola sumber pendanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Teorinya, keuangan publik dibagi menjadi dua kategori: positif dan normatif. Keuangan publik positif melibatkan penelitian tentang fakta, kondisi, dan hubungan antara variabel yang berhubungan dengan usaha pemerintah dalam mencari dan menggunakan dana, termasuk analisis sistem perpajakan dan anggaran yang ada. Dalam hal ini, tujuan dari keuangan publik positif adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, dan meramalkan kejadian yang berkaitan dengan keuangan negara. Sebaliknya, keuangan publik normatif berfokus pada aspek etika dan evaluasi nilai dalam konteks keuangan negara, seperti bagaimana perpajakan, belanja, dan pinjaman negara dapat menghasilkan

alokasi sumber daya yang efisien serta menjaga stabilitas ekonomi makro dan distribusi pendapatan yang adil. Oleh karena itu, kajian keuangan publik normatif lebih berkaitan dengan isu-isu kebijakan fiskal.

Menurut Solikin et al., (2024) keuangan publik atau keuangan negara berfokus pada upaya untuk merasionalisasi fungsi negara dalam ekonomi, yang didasarkan pada kegagalan pasar dalam mendistribusikan pendapatan secara adil sesuai dengan norma umum. Dalam studi keuangan publik saat ini, pendekatan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan literatur yang ada. Menurut Aprianto (2021) peran pemerintah sangat krusial dalam implementasi kebijakan keuangan publik. Ini terlihat dari peningkatan pengeluaran pemerintah, distribusi pendapatan yang lebih merata oleh negara, serta pengaturan langsung terhadap aktivitas ekonomi. Fungsi-fungsi pemerintah dapat dilihat melalui berbagai aktivitas yang meliputi pengawasan langsung, penyediaan barang publik untuk kepentingan sosial, menjaga stabilitas kebijakan keuangan dan moneter, produksi barang dan jasa oleh pemerintah, serta pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Teori Stewardship

Menurut (Syahara et al., 2024) teori stewardship didasarkan pada tiga asumsi utama, yaitu keterbatasan dalam rasionalitas, kepentingan bersama, dan pengawasan. Teori ini relevan untuk berbagai penelitian yang berkaitan dengan sektor publik dan dunia bisnis, yang memiliki karakteristik seperti transparansi, akuntabilitas, pengendalian, dan responsivitas. Konsep yang diusung dalam teori *stewardship*, termasuk kebersamaan (*collectivity*), kemitraan pemberdayaan (*empowerment*), saling percaya, serta pelayanan, terbukti efektif dan efisien

dalam pengelolaan akuntansi perusahaan karena mampu mengatasi masalah terkait dengan *good corporate governance*. Penerapan teori *stewardship* di bidang akuntansi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, karena organisasi tidak hanya berfokus pada pemaksimalan utilitas untuk diri sendiri, tetapi juga memiliki tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut konsep *stewardship*, manajer atau *steward* bertindak demi kepentingan kolektif kelompok (Maharani et al., 2024). Mereka menyadari bahwa keberhasilan organisasi berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan pribadi dan profesional mereka. Oleh karena itu, para *steward* cenderung fokus pada tujuan jangka panjang dan strategi yang berkelanjutan. Mereka percaya bahwa dengan mendukung kepentingan organisasi, mereka juga akan mendapatkan keuntungan secara tidak langsung. Hal ini menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kolaboratif, di mana setiap anggota organisasi merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik.

Teori *stewardship* juga menekankan pentingnya kolaborasi antara manajer dan pemilik, terutama ketika konflik kepentingan muncul. Manajer yang berperan sebagai *steward* berusaha untuk menjembatani perbedaan dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Mereka tidak melihat pemilik sebagai musuh, melainkan sebagai mitra dalam mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini berbeda dari cara pandang konfrontatif yang sering kali terkait dengan teori agensi, di mana kepentingan pribadi dan keuntungan jangka pendek lebih dijadikan fokus.

Teori *stewardship* mengklaim bahwa dengan memprioritaskan usaha untuk mencapai tujuan organisasi, manajer akan lebih cenderung bertindak demi kepentingan terbaik pemilik dan kepentingan bersama. Manajer yang berfungsi

sebagai steward menyadari bahwa keberhasilan organisasi mencerminkan kesuksesan mereka sendiri, sehingga mereka bekerja keras untuk memastikan bahwa organisasi mencapai tujuannya dengan cara yang etis dan berkelanjutan. Mereka menghargai kesejahteraan jangka panjang organisasi di atas keuntungan jangka pendek.

Salah satu implikasi praktis dari teori stewardship adalah perlunya organisasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi manajer agar berperilaku sebagai steward. Hal ini bisa dicapai dengan memberikan lebih banyak otonomi, mengakui kontribusi mereka, dan memberikan insentif yang sejalan dengan tujuan jangka panjang organisasi. Dengan membangun budaya organisasi yang robust dan kooperatif, manajer akan lebih terdorong untuk bertindak demi kepentingan terbaik organisasi, yang pada gilirannya dapat mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Teori stewardship memberikan pandangan yang lebih positif dan humanis mengenai perilaku manajer dalam organisasi. Dengan menganggap bahwa manajer memiliki kemampuan dan niat baik untuk bertindak demi kepentingan terbaik organisasi, teori ini menjadi landasan bagi terciptanya lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Ini juga menekankan pentingnya kolaborasi dan tujuan bersama, yang dapat membantu organisasi meraih kesuksesan jangka panjang serta keberlanjutan. Dalam konteks penelitian ini, penerapan teori stewardship dapat menjelaskan bagaimana manajer dapat berfungsi sebagai steward yang efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

Teori stewardship menjelaskan situasi di mana pemerintah beroperasi untuk mencapai tujuan dan kepentingan organisasi, tanpa didorong oleh

kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, pemerintah desa yang diwakili oleh kepala desa berfungsi sebagai pelayan, sementara masyarakat dianggap sebagai pemilik sumber daya (Fitriani et al., 2021).

Menurut Bjurstrøm (2020) teori stewardship berpendapat bahwa lembaga beroperasi dengan itikad baik. Namun, dapat dicatat bahwa dalam pengelolaan lembaga, pengaruh manajemen kinerja dipengaruhi oleh metode manajemen kinerja yang diterapkan serta tipe hubungan antara kementerian dan lembaga.

2.1.3 Konsep Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut (Yanti et al., 2020) Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pedoman dan prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Diterapkan dilingkungan pemerintah pusat dan dapertemennya maupun daerah dan dinas-dinasnya. SAP berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak diluar instansi. Standar Akuntansi Pemerintahan didefinisikan sebagai prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah maupun pusat. SAP ialah persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Urip Wardoyo et al., 2022). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip dalam menyusun laporan keuangan untuk meningkatkan kuliatas laporan keuangan. Menurut Lan & Tang (2020) Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan

pedoman dalam penyajian laporan keuangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat harus memuat unsur-unsur yang telah diatur dalam standar akuntansi pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintah dapat diartikan sebagai prasyarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selain itu, standar akuntansi pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah, termasuk mendukung penerapan standar tersebut (Kuntadi et al., 2023). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di Indonesia bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintah menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang dapat diperbandingkan, transparan, dan akuntabel. Namun, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang tidak memadai, dan pemahaman yang tidak merata di antara pejabat pemerintah (Marhamah & Indriastuti, 2024). Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan standar akuntansi yang terdiri dari serangkaian kebijakan, standar, dan prosedur yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang relevan, andal, dan tepat waktu. Laporan keuangan tersebut memberikan informasi yang berguna bagi pihak internal dan eksternal pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan ekonomi. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dimaksudkan untuk

memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kualitas yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik memegang peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan (Wulandari & Rahmadani, 2024).

2.1.4 Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2019) laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipercaya, tidak mengandung unsur manipulasi, tidak bias dan terbebas dari salah saji material. Reformasi akuntansi sektor publik telah menghasilkan perubahan krusial dalam pelaporan akuntansi oleh pemerintah, yaitu penerapan akuntansi akrual di sektor publik (Aswar et al., 2021). Dalam hal ini, penyediaan informasi keuangan yang dapat diakses mengenai pemerintah daerah merupakan hak warga negara dan bukan merupakan hak istimewa dan oleh karena itu pengelola daerah tidak mempunyai keleluasaan dalam menentukan jumlah dan jenis informasi yang harus diberikan tentang pemerintah daerah kepada masyarakat (Krah & Mertens, 2020).

Transparansi berkaitan dengan ketersediaan dan aksesibilitas informasi yang relevan (Krah & Mertens, 2020). Secara umum, transparansi keuangan adalah tentang pengungkapan seluruh informasi keuangan yang relevan secara tepat waktu dan sistematis (Krah & Mertens, 2020). Pelaporan keuangan pemerintah disiapkan untuk tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan dan ditujukan kepada berbagai pengguna, termasuk masyarakat (Cohen et al., 2022). Tujuan paling penting dari informasi akuntansi sektor publik adalah untuk

mengaktifkan dan meningkatkan pengawasan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (mungkin pemerintah pusat) daripada sebagai informasi untuk akuntabilitas publik kepada masyarakat eksternal (Zhang, 2022).

Menurut Darwis et al., (2022) laporan keuangan pemerintah merupakan hak masyarakat yang wajib diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Aksesibilitas yang memadai bergantung pada akses masyarakat terhadap laporan pertanggungjawaban dan penggunaan informasi yang dapat dibaca dan dipahami. Era demokrasi saat ini adalah akses terbuka yang diberikan melalui media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet), serta forum yang memberikan perhatian langsung atau berperan yang mendorong akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

Informasi akuntansi merupakan keluaran akhir sistem informasi akuntansi yang diwakili oleh kinerja sosial dan kualitas laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka merasionalisasi keputusannya (Alrabei et al., 2023). Informasi tersebut harus berkualitas tinggi yang ditentukan oleh karakteristik informasi akuntansi sebagai “semangat informasi akuntansi yang memberikan indikasi kelayakan dan kegunaan informasi, dan merupakan seperangkat kualitas yang harus dimiliki informasi akuntansi agar berguna untuk tujuan pengambilan keputusan pembuatan oleh pengguna”. Menurut teori keagenan, kualitas laporan keuangan meningkatkan kinerja pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas dengan mengurangi asimetri informasi. Selain itu, berdasarkan pendekatan teori agensi, transparansi dan informasi berguna dalam mengendalikan manajer dan membuat mereka bertanggung jawab atas keputusan mereka, serta kinerja organisasi secara keseluruhan (Anto & Yusran, 2023). IASB melibatkan kerangka komprehensif standar yang memenuhi persyaratan

pembuktian pendapatan dan menghilangkan kesenjangan dalam praktik akuntansi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan beberapa karakteristik kualitatif data. Karakteristik tersebut menjadi indikator kualitas laporan keuangan, termasuk (Relevansi, Representasi Setia, Komparabilitas, Keandalan, Pemahaman dan materialitas) (Salameh et al., 2022).

2.1.5 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah merupakan tingkat capaian dari hasil kerja di bidang keuangan daerah dimana meliputi anggaran dan realisasi anggaran dan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan oleh kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran (Sari & Riharjo, 2020). Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan tingkat pencapaian pada pelaksanaan kegiatan dimana pemerintah mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang tertuang dalam rencana strategis. Kinerja keuangann dapat menjadi perbandingan hasil yang dicapai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Menurut Kamaroellah & Syafik (2022) kinerja keuangan pemerintah dikatakan baik dan efisien apabila selisihnya kecil (realisasi belanja lebih kecil dari anggaran yang tersedia), dan dikatakan buruk apabila selisihnya besar (realisasi belanja lebih besar dari anggaran yang tersedia). Selain itu, kinerja keuangan daerah yang baik dapat dilihat dari efektivitas untuk menggali potensi daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat yang lebih rendah serta porsi yang lebih besar dari PAD untuk membiayai pembangunan di daerah (Zulkarnain, 2020).

Selanjutnya, kinerja keuangan dijadikan sebagai parameter untuk menilai keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pada pencapaian strategi pengelolaan keuangan daerah (Ramadhanti, 2022). Menurut Gian & Arif (2022)

kinerja keuangan pemerintah daerah harus seimbang dengan kesejahteraan masyarakat yaitu tujuan utama pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah, sehingga pemakaian APBD akan memberi dampak terwujudnya kesejahteraan masyarakat setempat. Keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah akan terus berkelanjutan. Semakin baik kinerja pemerintah daerah, maka akan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan rencana pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mendorong pembangunan daerah.

2.1.6 Analisis Rasio Keuangan

Menurut Wahyuni & Ali (2024) pembangunan daerah yang berkesinambungan harus dilaksanakan dengan menata pemerintahan yang baik. Dalam proses pembangunan daerah yang berkesinambungan diperlukan kebijakan ekonomi untuk mengatur sumber daya daerah dalam membiayai pembangunan baik itu pembangunan fisik dan non fisik. Untuk melihat seberapa mampu keuangan daerah dapat menjalankan atau membiayai pembangunan daerah tentu saja harus mengukur kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari rasio keuangan daerah.

Rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai keberlanjutan keuangan dan membandingkan kinerja (Dollery & Drew, 2023). Menurut Shawl & Nayak (2023) analisis rasio keuangan merupakan alat penting yang digunakan untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan, untuk menilai kesehatan keuangan. Rasio keuangan dapat diinterpretasikan secara efektif melalui perbandingan internal dan eksternal. Dalam perbandingan internal, seorang analis membandingkan rasio keuangan selama periode waktu tertentu. Melalui metode

perbandingan ini, seorang analis mendapat gambaran apakah kondisi keuangan dan kinerja perusahaan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Metode lain untuk menginterpretasikan rasio keuangan adalah metode perbandingan eksternal. Dalam metode ini, rasio keuangan suatu organisasi dibandingkan dengan organisasi sejenis pada periode waktu yang sama. Metode perbandingan ini memberikan gambaran tentang kondisi keuangan dan kinerja relatif suatu perusahaan. Hal tersebut memberikan indikasi adanya penyimpangan yang signifikan pada kinerja suatu organisasi dari rata-rata industri.

a. Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2019).

Cara mencari Rasio Derajat Desentralisasi dapat diperoleh dengan rumus:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi, 2019

Berikut kategorisasi nilai dari rasio

Sangat Rendah	: $\leq 10\%$
Rendah	: $> 10\% - 20\%$
Sedang	: $> 20\% - 30\%$
Cukup Tinggi	: $> 30\% - 40\%$
Tinggi	: $> 40\% - 50\%$

Sangat Tinggi : >50%

Sumber : Ulfa & Yuliafitri, 2023

b. Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan).

Cara mencari Rasio Efektivitas dapat diperoleh dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Berikut kategorisasi nilai efektivitas PAD:

Sangat efektif : >100%

Efektif : 100%

Cukup efektif : 90% - 99%

Kurang efektif : 75% - 89%

Tidak efektif : <75%

Sumber : Mahmudi, 2019

c. Serapan Anggaran Belanja

Anggaran ialah pernyataan estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran yang telah

disusun, lalu akan dievaluasi pada akhir tahun untuk melihat apakah estimasi kinerja tersebut telah tercapai (Makmur et al., 2021).

$$\text{Rasio Serapan Anggaran} = \frac{\text{Belanja yang Terealisasi}}{\text{Total Anggaran yang Dianggarkan}} \times 100\%$$

Sumber : Habbe, 2021

d. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Trisno et al., (2022) Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator dalam mencapai pembangunan ekonomi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan mengurangi kemiskinan. Pembangunan nasional merupakan untuk menjadi tujuan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah dengan menggunakan asas desentralisasi. Pembangunan daerah dilakukan secara integratif sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan sasaran pembangunan nasional. Pembangunan manusia menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan pembangunan nasional. Penekanan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup individu dan masyarakat. Tujuan tersebut berpusat pada konsep pembangunan manusia, yang menekankan pentingnya pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan inklusi sosial dalam mencapai tingkat pembangunan manusia yang lebih tinggi. Peran pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal melalui kinerja keuangan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran dengan didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakatnya, sehingga dengan desentralisasi dan otonomi diharapkan dapat memacu peningkatan

kesejahteraan masyarakat (Rahma et al., 2022). IPM menjadi salah satu indikator untuk mengklasifikasikan negara, apakah termasuk kategori negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang. IPM ini merefleksikan sejauh mana upaya dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pembangunan manusia, khususnya melalui upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan partisipasi penduduk dalam pembangunan (Winarni et al., 2022).

Tabel 2. 1
Kategori Interpretasi Indeks Pembangunan Manusia

No	Persentase IPM	Interpretasi Kategori IPM
1.	$IPM \geq 80$	Sangat Tinggi
2.	$70 \leq IPM \leq 80$	Tinggi
3.	$60 \leq IPM \leq 70$	Sedang
4.	$IPM < 60$	Rendah

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang relevan terdahulu dapat dijadikan sebagai komparasi dan referensi guna memberikan gambaran penelitian pada saat ini. Penelitian yang dilakukan oleh Winarni et al., (2022) menjelaskan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Provinsi Jambi. Selain itu, Gian & Arif (2022) menyatakan hal yang sama yaitu secara parsial rasio derajat desentralisasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dan begitu juga menurut penelitian (Astuti & Mispiyanti, 2020) yang menunjukkan derajat desentralisasi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan penelitian Zein & Septiani (2024) menyatakan bahwa rasio desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, terkait rasio efektivitas PAD dalam penelitian (Zein & Septiani, 2024)

kinerja keuangan yang diukur rasio efektivitas mempunyai pengaruh dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Menurut Wahyuni & Ali (2024) efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Selain itu, menurut Siregar (2023) kinerja keuangan yang ukurannya direfleksikan dengan efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap IPM. Menurut Habbe (2021) efektivitas PAD dapat menurunkan angka pengangguran pada dua dan tiga tahun ke depan namun gagal meningkatkan IPM dan mengurangi kemiskinan. Astuti & Mispiyanti (2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan, Khairudin et al., (2020) menyatakan kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat pada pemerintah daerah di Indonesia belum begitu baik efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Terakhir, Sutono (2022) mengungkapkan bahwa penyerapan belanja pemda tidak memiliki pengaruh signifikan pada IPM, sedangkan penyerapan belanja pempus berpengaruh signifikan pada IPM. Secara bersama-sama, penyerapan belanja pemda dan penyerapan belanja pempus berpengaruh signifikan pada IPM. Satu tahun kemudian, Rahim et al. (2023) mengungkapkan bahwa belanja pendidikan dan belanja kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Keterkaitan teori keuangan publik pada penelitian ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan suatu negara atau daerah yang menunjukkan seberapa baik pemerintah mengelola sumber daya. Teori keuangan publik menekankan bahwa pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien adalah penting untuk mendanai berbagai program pembangunan, termasuk yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (IPM). Kinerja keuangan yang baik akan menghasilkan peningkatan

belanja publik untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya akan membantu meningkatkan IPM. Selain itu, teori keuangan publik membahas bagaimana sumber daya didistribusikan ke berbagai sektor publik. Pemerintah dapat melakukan investasi lebih besar dalam bidang pembangunan manusia seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan jika mereka memiliki kinerja keuangan yang baik.

Jika dilihat dari teori *stewardship*, maka keterkaitan pada penelitian ini adalah untuk berkontribusi pada peningkatan IPM dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, pemimpin yang berfungsi sebagai steward akan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja keuangan sambil mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Teori *stewardship* mendukung pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan kinerja organisasi, di mana kinerja keuangan dan tanggung jawab sosial berjalan beriringan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana IPM menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Tabel 2.2
Penelitian yang Revelan dan Terdahulu

No	Nama pengarang (Sumber dan Tahun)	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	(Zein & Septiani, 2024)	Menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan kemiskinan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis jalur, menggunakan data sekunder keuangan pemerintah kota/ kabupaten di Provinsi Banten tahun 2018-2022.	Variabel x : kinerja keuangan (rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio desentralisasi fiskal, dan rasio ketergantungan) Variabel y : belanja modal, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan kemiskinan.	Kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio desentralisasi fiskal, dan rasio ketergantungan mempunyai pengaruh dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio desentralisasi fiskal, dan rasio ketergantungan mempunyai pengaruh dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio desentralisasi fiskal, dan rasio ketergantungan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Variabel x yang digunakan yaitu desentralisasi daerah, kemandirian keuangan daerah, dan efektivitas PAD. Variabel y yang digunakan IPM. Metode penelitian menggunakan statistik deskriptif kuantitatif dan analisis regresi berganda dan menggunakan data sekunder.	Sampel yang digunakan seluruh kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017-2022.

2.	(Wahyuni & Ali, 2024)	Meneliti Pengaruh Kemandirian Keuangan, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Keuangan terhadap Pembangunan Daerah	Variabel x : Kemandirian Keuangan, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Keuangan Variabel y : Pembangunan Daerah	1) Kemandirian Keuangan berpengaruh terhadap Pembangunan Daerah; 2) Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pembangunan Daerah; dan 3) Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap Pembangunan Daerah.	Variabel x yang digunakan yaitu kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD.	Variabel x ialah derajat desentralisasi. Variabel y yang digunakan ialah Indeks Pembangunan Daerah. Sampel yang digunakan seluruh kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017-2022. Analisis data menggunakan statistik deskriptif kuantitatif dan analisis regresi berganda sedangkan penelitian terdahulu menggunakan deskriptif kualitatif.
3.	(Siregar, 2023)	Memberikan analisis tentang pengaruh kinerja	Variabel x : Efektivitas PAD, Rasio	Kinerja keuangan yang ukurannya direfleksikan dengan Efektivitas PAD, Rasio Belanja Modal, Pertumbuhan PAD dan Kemandirian Keuangan	Variabel x yang digunakan yaitu efektivitas PAD	Variabel x yang lain ialah derajat

		keuangan pemerintah setelah pemekaran dalam mempengaruhi IPM sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.	Belanja Modal, Pertumbuhan PAD dan Kemandirian Keuangan, Efisiensi Belanja Daerah Variabel y : IPM	berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan Efisiensi Belanja Daerah tidak berpengaruh.	dan kemandirian keuangan daerah. Variabel y yang digunakan IPM. Metode penelitian menggunakan statistik deskriptif kuantitatif dan analisis regresi berganda. Penelitian ini menggunakan data sekunder.	desentralisasi. Sampel yang digunakan seluruh kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017-2022.
4.	(Winarni et al., 2022)	Penelitian ini menganalisis kondisi kinerja keuangan daerah dan indeks pembangunan manusia (IPM); hubungan kinerja keuangan daerah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Jambi.	Variabel x : Kinerja Keuangan yang diukur dengan derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian daerah, efektivitas PAD dan efisiensi PAD Variabel y : Indeks Pembangunan Manusia	Kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jambi masuk dalam kategori rendah hal ini ditunjukkan dari tingkat DDF dengan kriteria cukup, KKD dengan kriteria sangat tinggi, KMD dengan kriteria sangat kurang, dan Keserasian Belanja dalam kriteria cukup. Selanjutnya Rasio derajat desentralisasi fiskal dan keserasian belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Provinsi, sedangkan pada rasio ketergantungan keuangan daerah, efektivitas PAD dan efisiensi PAD Provinsi Jambi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Jambi. serta kemandirian keuangan daerah, keserasian belanja langsung dan derajat desentralisasi fiskal berhubungan kuat dengan IPM sementara Kemandirian daerah berhubungan lemah dengan IPM.	Variabel y yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Metode penelitian menggunakan statistik deskriptif kuantitatif dan analisis regresi berganda. Penelitian ini menggunakan data sekunder.	Peneliti menggunakan variabel x yaitu kinerja keuangan namun diukur dengan derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, dan efektivitas PAD. Sampel yang digunakan seluruh kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada

						Tahun 2017-2022.
5.	(Gian & Arif, 2022)	Menganalisa kinerja keuangan daerah (rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah) Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Serta guna melihat pengaruhnya baik secara simultan maupun parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	Variabel x : rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah Variabel y : IPM	Temuan analisis memperlihatkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih mempunyai kinerja keuangan daerah yang relatif rendah. Analisis regresi data panel memakai metode Fixed Effect Model (FEM) mengungkapkan kinerja keuangan daerah secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan secara parsial rasio derajat desentralisasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	Variabel x yang digunakan yaitu desentralisasi daerah dan kemandirian keuangan daerah. Variabel y yang digunakan IPM.	Variabel x yang lain ialah efektivitas PAD. Sampel yang digunakan seluruh kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017-2022. Metode penelitian menggunakan statistik deskriptif kuantitatif dan analisis regresi berganda.
6.	(Habbe, 2021)	Menguji pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat kesejahteraan di 25 kota/kabupaten	Variabel x : tingkat otonomi daerah, efektivitas pendapatan asli daerah, keselarasan	Analisis regresi menunjukkan bahwa kinerja otonomi daerah terbukti meningkatkan IPM pada tahun depan dan menurunkan angka kemiskinan pada dua dan tiga tahun ke depan, namun tidak berkorelasi dengan pengangguran. Efektivitas PAD dapat menurunkan angka	Variabel x yang digunakan yaitu efektivitas PAD. Variabel y yang digunakan IPM.	Variabel x yang lain ialah derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan

		di Sulawesi Selatan selama tahun 2009–2014.	anggaran dan penyerapan anggaran Variabel y : indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran dan kemiskinan. tingkat.	pengangguran pada dua dan tiga tahun ke depan namun gagal meningkatkan IPM dan mengurangi kemiskinan. Kesenjangan belanja juga diabaikan dalam upaya meningkatkan IPM dan menurunkan tingkat pengangguran padahal dapat mengentaskan kemiskinan. Tingkat penyerapan anggaran mampu meningkatkan IPM dan mengurangi pengangguran pada dua dan tiga tahun ke depan, namun gagal menurunkan kemiskinan. Kesenjangan belanja dan serapan anggaran gagal memoderasi hubungan otonomi daerah, efektivitas PAD dan seluruh pengukuran kesejahteraan, sedangkan keselarasan belanja mampu memoderasi hubungan efektivitas PAD dengan IPM.		daerah. Sampel yang digunakan seluruh kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017-2022. Metode penelitian menggunakan statistik deskriptif kuantitatif dan analisis regresi berganda.
7.	(Astuti & Mispriyanti, 2020)	Membuktikan secara empiris pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.	Variabel x : Kinerja Keuangan Variabel y : Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, indeks pembangunan manusia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi, efisiensi, efektivitas, belanja operasional, belanja modal, pertumbuhan, dan ketergantungan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan derajat desentralisasi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Kemandirian, efisiensi, efektivitas, pertumbuhan ketergantungan, dan derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Sedangkan belanja operasional dan belanja modal berpengaruh terhadap kemiskinan. Kemandirian, efektivitas, belanja modal, pertumbuhan, ketergantungan, dan derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap	Variabel x yang digunakan yaitu desentralisasi daerah dan kemandirian keuangan daerah. Variabel y yang digunakan IPM. Sampel yang digunakan seluruh kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah.	Variabel x yang lain ialah efektivitas PAD. Data yang digunakan yaitu pada Tahun 2017-2022. Metode penelitian menggunakan statistik deskriptif kuantitatif dan analisis regresi berganda.

				pengangguran. Sedangkan efisiensi dan pengeluaran operasional berpengaruh terhadap pengangguran. Independensi, efisiensi, efektivitas, belanja operasional, belanja modal, pertumbuhan, ketergantungan, dan derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.		
8.	(Khairudin et al., 2020)	Memotret kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat pada pemerintah daerah di Indonesia serta membuktikan secara empiris pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat.	Variabel x : rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio pertumbuhan keuangan daerah Variabel y : Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	Hasil penelitian berdasarkan periode pengamatan menemukan bukti bahwa (1) kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat pada pemerintah daerah di Indonesia belum begitu baik; (2) kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat; (3) efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat; (4) efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan (5) pertumbuhan keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.	Variabel x yang digunakan yaitu efektivitas PAD dan kemandirian keuangan daerah. Variabel y yang digunakan IPM.	Variabel x yang lain ialah derajat desentralisasi. Sampel yang digunakan seluruh kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017-2022. Metode penelitian menggunakan statistik deskriptif kuantitatif dan analisis regresi berganda.
9.	(Sutono, 2022)	Menggali sejauh mana pengaruh belanja pemerintah pada IPM di Provinsi	Variabel x : belanja pemerintah pusat (pempus)	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyerapan belanja pemda tidak memiliki pengaruh signifikan pada IPM, sedangkan penyerapan belanja pempus berpengaruh	Variabel y yang digunakan IPM. Kajian dilakukan dengan metode kuantitatif	Sampel data menggunakan 12 pemda (kabupaten

		Riau, yang meliputi belanja pemerintah pusat (pempus) dan pemerintah daerah (pemda).	dan pemerintah daerah (pemda). Variabel y : Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	signifikan pada IPM. Secara bersama-sama, penyerapan belanja pemda dan penyerapan belanja pempus berpengaruh signifikan pada IPM.	memakai analisis regresi data panel.	dan kota) yang berada Provinsi Riau selama tahun 2015-2020.
10.	(Rahim et al., 2023)	Menganalisis pengaruh belanja pendidikan dan belanja kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Tenggara	Variabel x : belanja pendidikan dan belanja kesehatan Variabel y : Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	Secara parsial, hanya Belanja Ekonomi dan Belanja Kesehatan memberikan dampak, sementara Belanja Pendidikan tidak memberikan kontribusi dampak yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada beberapa Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2010-2021 ini di karenakan kurang optimalnya penyerapan realisasi anggaran belanja fungsi pendidikan.	Variabel y yang digunakan IPM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pengukuran dilakukan melalui tahapan uji melalui aplikasi regresi data panel e-View	Sampel yang digunakan 10 dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2010-2021.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022.

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintah yang lebih rendah. Desentralisasi mengacu pada alokasi wewenang dimana memungkinkan pemerintah daerah dapat membuat keputusan dan mengambil tindakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya.

Dalam konsep desentralisasi, teori keuangan publik memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dan menganalisis implikasi dari derajat desentralisasi, baik di dalam konteks pengelolaan keuangan daerah maupun dalam kaitannya dengan efisiensi, akuntabilitas, dan pembangunan daerah. Derajat desentralisasi dapat mempengaruhi kualitas tata kelola pada pemerintah daerah. Ketika desentralisasi tinggi maka pemerintah daerah memiliki tingkat otonomi yang lebih tinggi untuk membuat keputusan dan mengatur sumber daya daerahnya. Hal ini mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Desentralisasi menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan kolaboratif, yang sejalan dengan prinsip-prinsip teori

stewardship. Dengan memberikan wewenang lebih, manajemen pusat menunjukkan kepercayaan kepada pengelola di tingkat bawah, yang akan memperkuat hubungan dan mendorong untuk lebih percaya pada pengelola. Derajat desentralisasi dapat memperkuat prinsip-prinsip teori *stewardship* dengan memberikan otonomi, meningkatkan kepercayaan, serta membangun motivasi dan komitmen.

Menurut Pramatha et al., (2023) pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat tercapai bila pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik dan meminimalisir ketergantungan kepada pemerintah pusat. Semakin besar pendapatan asli daerah, maka pemerintah daerah akan memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengelola dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan infrastruktur dan fasilitas umum, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan pengembangan wilayah dan ekonomi yang merupakan dasar dalam pengukuran IPM. Semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal pada suatu daerah akan meningkatkan pencapaian indeks pembangunan manusia. Selain itu, semakin tinggi pendapatan asli daerah, semakin mudah bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana ke bidang-bidang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti: peningkatan biaya pendidikan, indeks harapan hidup, dan paritas daya beli. Hal ini menjadi dasar pengukuran IPM (Pramatha et al., 2023).

Hal yang sama diungkapkan pula dalam penelitian Sari & Riharjo (2020) dimana semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh suatu daerah maka semakin tinggi dana yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam pembangunan layanan publik seperti peningkatan indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup layak yang ketiganya merupakan dasar pengukuran IPM.

Rasio ini menunjukkan besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah dapat lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Jika pelayanan publik meningkat maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Mutiha, 2017). Jadi, dapat disimpulkan bahwa derajat desentralisasi di Indonesia memiliki dampak terhadap indeks pembangunan manusia.

H1 : Derajat Desentralisasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022.

2.3.2 Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022.

Menurut Munfarida & Priyojadmiko (2020) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima Pemerintah Daerah dari sumber-sumber potensi daerah yang ada untuk dapat dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi. Pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan dapat menghasilkan aliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selain itu, pendapatan asli daerah diharapkan dapat menyediakan dana untuk meningkatkan infrastruktur masyarakat yang ada (Fadillah et al., 2023). Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan daerah tinggi belum tentu mampu merealisasikan target kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakannya. Fasilitas layanan publik yang disediakan belum tentu dapat maksimal, jika pendapatan yang diperoleh tidak dialokasikan dengan baik.

Teori keuangan publik menjelaskan bagaimana pemerintah mengumpulkan pendapatan untuk membiayai layanan publik. Pendapatan asli daerah, sebagai sumber pendapatan utama untuk pemerintah daerah, mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola dan memaksimalkan sumber daya lokal, seperti pajak daerah, retribusi, dan sumber lainnya. Dalam konteks teori keuangan publik, efektivitas tidak hanya berkaitan dengan seberapa banyak

pendapatan yang dapat dikumpulkan, tetapi juga seberapa efisien pemerintah daerah dalam menggunakan pendapatannya. Efektivitas PAD berarti bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan pendapatan secara optimal untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Peran dalam Pembangunan Daerah: Efektivitas PAD berhubungan dengan teori keuangan publik yang menekankan pentingnya pendanaan yang cukup untuk program-program pembangunan. PAD yang tinggi dapat memberikan ruang lebih bagi pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan layanan publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Teori *stewardship* menegaskan pentingnya pengelolaan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip *stewardship*, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam memaksimalkan PAD dan memberikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat.

Tingkat keberhasilan pemerintah daerah, jika dinilai dalam melaksanakan kegiatannya tidak hanya tergantung pada angka pendapatan, namun juga bagaimana pemerintah daerah mengolah pendapatan yang berasal dari sumber daerahnya. Kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan seluruh penerimaan PAD sesuai dengan apa yang ditargetkan ditunjukkan pada rasio efektivitas

PAD. Dalam pengelolaan PAD secara optimal oleh pemerintah daerah diharapkan memiliki sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan kegiatannya, yakni dalam bidang-bidang yang mempengaruhi standar layak hidup masyarakat sehingga tercapainya Indeka Pembangunan Manusia yang tinggi (Sari & Riharjo, 2020).

H2 : Efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022.

2.3.3 Pengaruh Serapan Anggaran terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022.

Adanya kewenangan yang diberikan daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah agar mengelola program dan pembangunan secara proporsional dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditentukan. Anggaran belanja daerah mempunyai peran secara nyata dalam peningkatan kualitas layanan publik dan menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik (Rangkuty et al., 2022).

Teori keuangan publik menjelaskan bagaimana pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk berbagai program dan infrastruktur. Dalam konteks keuangan publik, efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Serapan anggaran yang tinggi dapat menunjukkan bahwa pemerintah mampu menggunakan anggaran dengan efektif, sedangkan serapan yang rendah dapat menunjukkan ineffisiensi dalam pengeluaran.

Pada konteks pemerintahan, pejabat publik dianggap sebagai *steward* yang bertugas untuk mengelola anggaran dan sumber daya dengan cara yang memperhatikan kepentingan masyarakat. Dalam teori *stewardship*, penting bagi pemerintah untuk merencanakan dan mengelola anggaran dengan baik. *Stewardship* juga menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Serapan anggaran yang optimal harus disertai dengan laporan yang jelas tentang penggunaan anggaran, sejauh mana program telah dilaksanakan, dan dampaknya terhadap masyarakat.

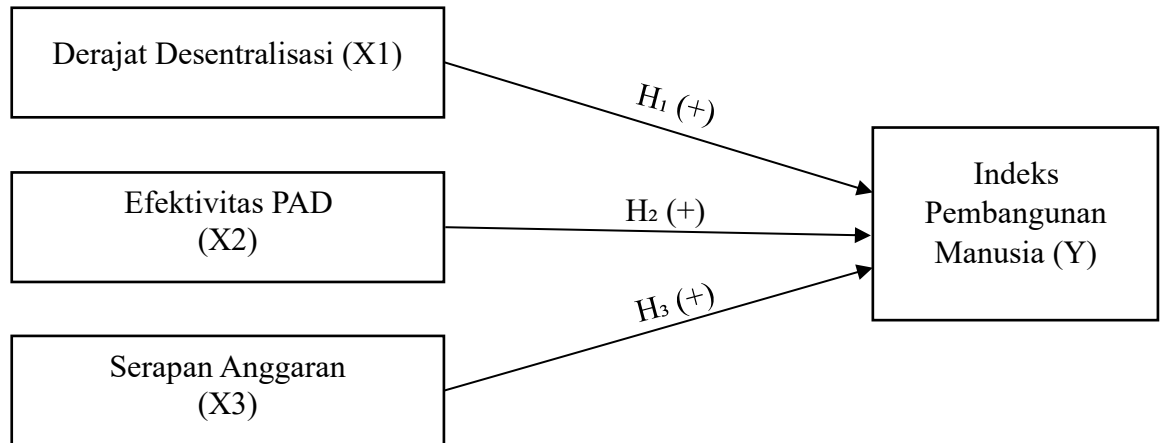
Menurut Sutono (2022) alokasi belanja pemerintah untuk sektor ekonomi dan perlindungan sosial diharapkan dapat memberikan jaminan kepada masyarakat supaya memiliki kesempatan kerja yang luas. Dengan demikian, masyarakat memiliki pendapatan yang lebih stabil. Peluang untuk bekerja dan tingkat pendapatan yang tinggi akan mudah diperoleh oleh jika seseorang

memiliki Pendidikan yang tinggi dan keterampilan yang relevan dengan bidang pekerjaan yang dilakukan. Aktivitas belanja pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (IPM). Semakin optimal penyerapan anggaran untuk realisasi kegiatan, maka akan berdampak pada efisiensi dan kualitas pada banyak fasilitas umum dan pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat (Makmur et al., 2021). Kesimpulannya, serapan anggaran yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pemerintah mampu menyerap dan memanfaatkan anggaran yang dialokasikan secara efektif, yang dapat mengarah pada peningkatan capaian pembangunan manusia.

H3 : Serapan Anggaran berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022.

2.4 Kerangka Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang relevan, maka dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah setiap kejadian, situasi, perilaku, atau karakteristik individu yang bervariasi. Setiap variabel harus memiliki dua atau lebih tingkat atau nilai (Cozby, 2015). Definisi operasional variabel adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengukur atau mengubah variabel tersebut. Suatu variabel harus memiliki definisi operasional agar dapat dipelajari secara empiris. Peneliti menggunakan istilah variabel independen dan variabel dependen saat merujuk pada variabel yang sedang dipelajari. Variabel yang dianggap sebagai penyebab disebut variabel independen, dan variabel yang merupakan efek disebut variabel dependen.

3.1.1 Variabel Independen

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang berperan dalam memengaruhi variabel terikat, di mana variabel ini menjadi faktor yang menyebabkan perubahan dalam nilai variabel dependen (Juliandi et al., 2014).

a. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung dengan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dan total penerimaan daerah.

Pengukuran variabel derajat desentralisasi dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

b. Efektivitas PAD

Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Pengukuran variabel efektivitas PAD dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Total Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

c. Serapan Anggaran

Serapan anggaran dihitung dengan cara membandingkan realisasi belanja dibagi pagu anggaran belanja. Pengukuran variabel serapan anggaran dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Rasio Serapan Anggaran} = \frac{\text{Belanja yang Terealisasi}}{\text{Total Anggaran yang Dianggarkan}} \times 100\%$$

3.1.2 Variabel Dependen

Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu variabel bebas (Juliandi et al., 2014). Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Azfirmawarman et al., (2023) Tiga aspek utama untuk mengukur indeks pembangunan manusia mencakup kualitas kesehatan, kualitas pendidikan, dan standar hidup yang memadai. Dimensi kesehatan dievaluasi melalui

harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu, serta usia pernikahan pertama bagi perempuan. Selanjutnya, dalam aspek pendidikan, parameter yang digunakan meliputi angka melek huruf, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan harapan lama belajar. Di sisi lain, daya beli masyarakat untuk kebutuhan dasar diukur dengan rata-rata pengeluaran per kapita, yang juga mencerminkan pendapatan penduduk sebagai indikasi dari berhasilnya usaha meningkatkan kualitas hidup yang layak. Pengukuran variabel indeks pembangunan manusia dapat diukur dengan rumus :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} + I_{Pendidikan} + I_{Pengeluaran}} \times 100$$

3.2 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif cenderung berfokus pada perilaku spesifik yang dapat dengan mudah diukur (misalnya, dihitung). Penyelidikan kuantitatif umumnya mencakup sampel yang lebih besar. Kesimpulan dalam penelitian kuantitatif didasarkan pada analisis statistik data (Cozby, 2015). Teknik pengumpulan data penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan studi yang dilakukan (Juliandi et al., 2014). Pengumpulan data diperoleh dari laman website Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan BPS.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari semua elemen yang terdapat dalam suatu area penelitian (Juliandi et al., 2014). Populasi yang digunakan adalah seluruh Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 - 2022. Sedangkan sampel adalah perwakilan dari populasi (Juliandi et al., 2014). Sampel dalam penelitian ini adalah setiap Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017 - 2022. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik sampel jenuh, dimana seluruh anggota populasi diikutsertakan sebagai sampel.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian terdiri dari sumber data sekunder. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang telah ada sebelumnya dan diambil oleh peneliti untuk mendukung penelitiannya (Juliandi et al., 2014). Data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah Kota dan Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2022. Penelitian ini menggunakan data panel. Data panel merupakan kombinasi data *cross section* dan *time series*.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat mempengaruhi keakuratan dan validitas hasil

penelitian (Yusuf, 2014). Sedangkan menurut Juliandi et al., (2014) analisis data analisis data merujuk pada proses memahami dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan diolah, sehingga menghasilkan informasi yang spesifik. Analisa data yang digunakan pada penelitian ini masing-masing, yaitu statistik deskriptif dan analisis regresi data panel. Statistik deskriptif juga digunakan untuk memberikan deskripsi mengenai data-data yang terkait dalam penelitian ini. Analisis data dengan pendekatan statistik deskriptif berarti menyusun dan menggambarkan data numerik agar lebih mudah dipahami. Metode ini biasanya melibatkan penggunaan berbagai ukuran, seperti rata-rata, median, modus, frekuensi, tabel silang, serta berbagai jenis grafik (Juliandi et al., 2014). Informasi dari analisis deskriptif akan membuat data lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan (Elmashtawy et al., 2024).

Selain analisis deskriptif, analisis data menggunakan regresi data panel dengan software *e-views*. Regresi data panel digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Menurut Zineelabidine et al., (2024) data panel merupakan gabungan dari *cross section* dan *time series*, yang memungkinkan pertimbangan berbagai aspek heterogenitas dalam dinamika keuangan pada pemerintah daerah. Analisis regresi data panel pada penelitian ini, tidak dilakukan pengujian asumsi klasik. Hal ini disebabkan bahwa data panel memungkinkan peneliti untuk menganalisis perilaku yang lebih kompleks

dalam model, sehingga pengujian data panel tidak memerlukan uji asumsi klasik (Khikmah et al., 2020).

Berikut rumus dari model regresi panel :

$$Y = \alpha + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + b_3X_{3it} + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (indeks pembangunan manusia)

α = Konstanta

X_1 = Variabel independen 1 (derajat desentralisasi)

X_2 = Variabel independen 2 (efektivitas PAD)

X_3 = Variabel independen 3 (serapan dana)

$b_{(1,2,3)}$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

e = Error term

t = Waktu

i = Pemerintahan kabupaten/kota

Sumber : Basuki, 2021

Dalam metode estimasi model regresi menggunakan data panel, terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan:

1. Model Efek Umum (*Common Effect Model*)

Merupakan pendekatan paling dasar dalam analisis data panel, karena hanya menggabungkan data deret waktu dan potongan lintas. Dalam model ini, baik dimensi waktu maupun individu tidak dipertimbangkan, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan adalah seragam sepanjang periode waktu yang berbeda.

Metode ini dapat menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

2. Model Efek Tetap (*Fixed Effect Model*)

Model ini berasumsi bahwa perbedaan antar individu dapat dijelaskan melalui perbedaan intersep. Dalam estimasi data panel dengan model Efek Tetap, digunakan teknik variabel dummy untuk menangkap variasi intersep antar perusahaan, yang mungkin disebabkan oleh perbedaan dalam budaya kerja, manajemen, dan insentif. Namun, kemiringan (*slope*) dianggap sama di antara perusahaan. Model ini kadang-kadang disebut sebagai teknik *Least Squares Dummy Variable (LSDV)*.

3. Model Efek Acak (*Random Effect Model*)

Model ini digunakan untuk mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berkorelasi baik dalam waktu maupun antar individu. Dalam model Efek Acak, perbedaan intersep dijelaskan oleh error terms dari masing-masing perusahaan. Salah satu keuntungan dari model Efek Acak adalah dapat mengatasi masalah heteroskedastisitas. Model ini juga dikenal sebagai *Error Component Model (ECM)* atau teknik *Generalized Least Square (GLS)*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Data Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan indikator rasio derajat desentralisasi, efektivitas pendapatan asli daerah, dan serapan dana. Sedangkan untuk indikator kesejahteraan masyarakat diukur dengan indeks pembangunan manusia. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan ialah data pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah dan IPM Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2022. Data yang diperoleh bersumber dari laman website Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan BPS. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah yaitu Semarang. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh, dimana seluruh anggota populasi diikutsertakan sebagai sampel. Selanjutnya, analisis olah data menggunakan software *e-views*. Metode estimasi model regresi menggunakan data panel, dimana terdapat tiga pendekatan yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, *Random Effect Model*.

4.2. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan informasi atas data yang telah dikumpulkan terkait distribusi data. Analisis ini terdiri dari beberapa komponen utama yang digunakan untuk menggambarkan dan merangkum data seperti nilai terendah, nilai tertinggi, rata-rata, dan standar deviasi. Hasil uji statistik deskriptif untuk masing-masing variabel pada Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

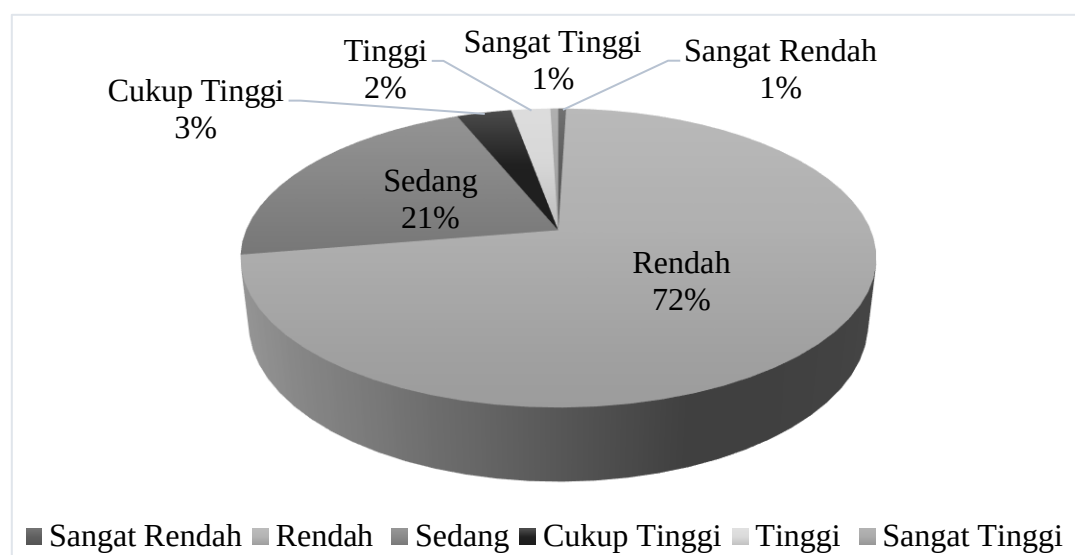
Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Derajat Desentralisasi	210	0,1	0,51	0,19	0,07016
Efektivitas PAD	210	0,81	1,44	10,783	0,11423
Serapan Anggaran	210	0,75	0,96	0,9027	0,03985
IPM	210	0,65	0,84	0,7237	0,04467
Valid N (listwise)	210				

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis tabel diatas, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Derajat desentralisasi Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2017-2022 memiliki nilai terendah 0,1 atau setara dengan 10% berada pada Kabupaten Blora tahun 2018 dengan kriteria *Sangat Rendah*. Sedangkan nilai terbesarnya sebesar 0,51 atau setara 51% yang berada pada Kota Semarang tahun 2022 dengan kriteria *Sangat Tinggi*. Nilai rata-rata derajat desentralisasi sebesar 0,19 atau setara dengan 19% dengan kriteria *Rendah*. Ini menunjukkan adanya potensi terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk mendanai berbagai aktivitasnya.

Hal ini dapat berakibat mulai dari terhambatnya pembangunan daerah hingga keterbatasan pada pelayanan publik. Pemerintah penting untuk mengelola keuangan secara efektif dan efisien yang diharapkan mampu untuk membiayai serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Standar deviasi sebesar 0,0716 atau setara dengan 7,16%. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, hal itu menunjukkan bahwa variabel derajat desentralisasi memiliki data yang tidak bervariasi.



Sumber : Data diolah, 2024

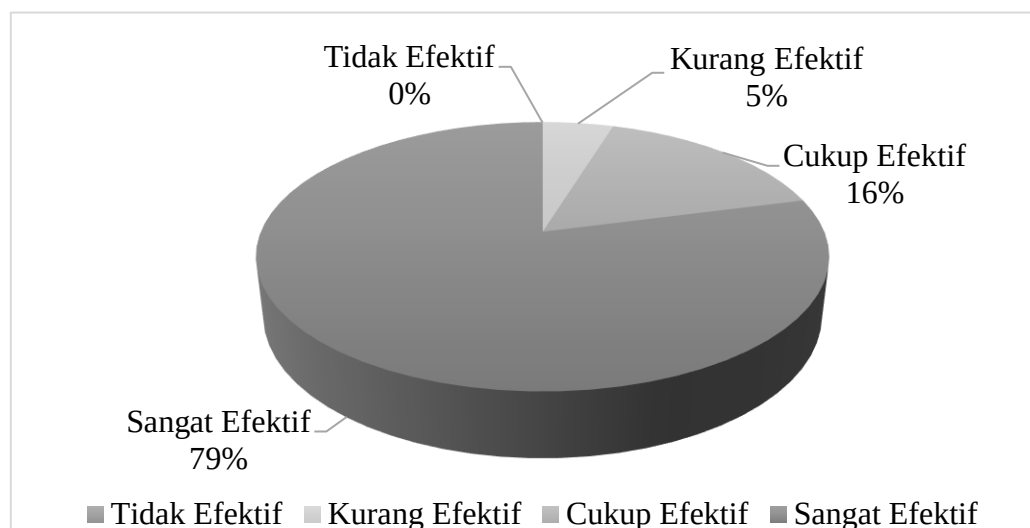
Gambar 4. 1
Persentase Distribusi Frekuensi Derajat Desentralisasi
Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat distribusi frekuensi dimana kriteria derajat desentralisasi dengan kategori sangat tinggi memiliki persentase sejumlah 1% dan berada pada Kota Semarang Tahun 2022. Selanjutnya, kriteria derajat desentralisasi yang memiliki

kategori tinggi memiliki persentase sejumlah 2% yang berada pada Kota Semarang Tahun 2017 – 2021. Kriteria derajat desentralisasi yang memiliki kategori sedang memiliki persentase sejumlah 21% yang berada seperti pada Kabupaten Banyumas Tahun 2020 – 2022, Kabupaten Boyolali Tahun 2021, Kabupaten Kudus Tahun 2017, 2021, 2022, dan lain-lain. Sedangkan untuk kriteria derajat desentralisasi dengan kategori rendah, memiliki persentase terbanyak yaitu sejumlah 72% yang berada seperti pada Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022, Kabupaten Batang 2017 – 2022, Kabupaten Kebumen Tahun 2017 – 2022, dan lain-lain. Terakhir, kriteria derajat desentralisasi dengan kategori sangat rendah, memiliki persentase sejumlah 1% yang berada pada Kabupaten Blora Tahun 2018. Rincian data distribusi frekuensi derajat desentralisasi Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada lampiran 3.

2. Efektivitas pendapatan asli daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2017-2022 memiliki nilai terendah 0,81 atau setara dengan 81% kriteria *Kurang Efektif* berada pada Kabupaten Pekalongan tahun 2022, sedangkan nilai terbesarnya sebesar 1,44 atau setara 144% berada pada Kabupaten Purworejo tahun 2021 dengan kriteria *Sangat Efektif*. Nilai rata-rata efektivitas pendapatan asli daerah sebesar 107,83 atau setara dengan 107,83% dengan kriteria *Sangat Efektif*. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang baik dalam

merealisasikan PAD dilihat dari apa yang sudah direncanakan terhadap target berdasarkan potensi nyata di daerah tersebut, Pendapatan asli daerah yang efektif dirasa dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat luas seperti meratanya pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas dari layanan publik, dan stabilitas keuangan. Pendapatan asli daerah yang efektif diharapkan mampu mencapai Pembangunan berkelanjutan hingga mencapai kesejahteraan Masyarakat. Standar devisiasi sebesar 0,11423 atau setara dengan 11,423%. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa nilai standar devisiasi lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, hal itu menunjukkan bahwa variabel efektivitas pendapatan asli daerah memiliki data yang tidak bervariasi.



Sumber : Data diolah, 2024

Gambar 4. 2
Persentase Distribusi Frekuensi Efektivitas PAD
Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022

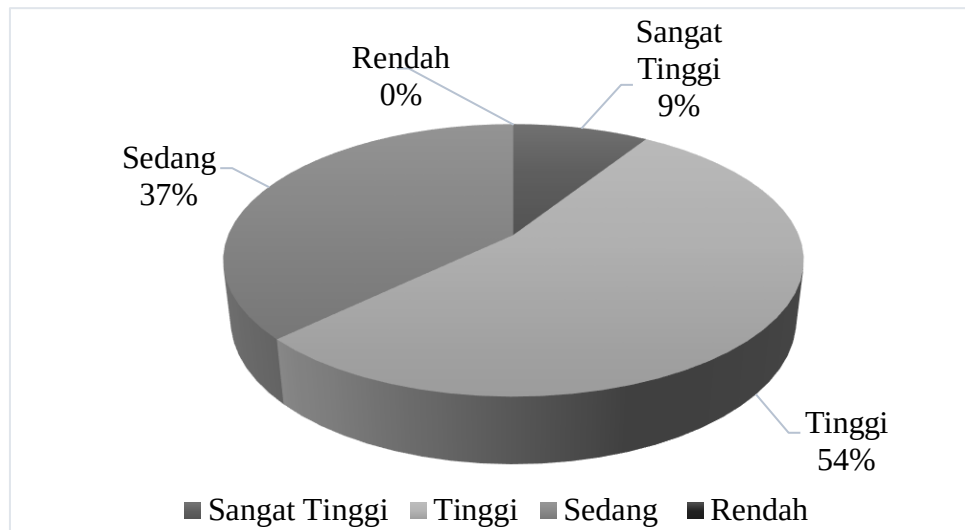
Berdasarkan data gambar diatas, dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi efektivitas PAD dengan kategori sangat efektif memiliki persentase tertinggi dengan jumlah 79% seperti pada Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2021, Kabupaten Banyumas Tahun 2017 – 2021, Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2022, dan lain-lain. Kategori cukup efektif memiliki persentase sejumlah 16% berada pada Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022, Kabupaten Banyumas Tahun 2022, Kabupaten Batang Tahun 2019, dan lain-lain. Sedangkan untuk kategori kurang efektif memiliki persentase sejumlah 5% berada pada Kabupaten Magelang Tahun 2018, Kabupaten Tegal Tahun 2018, Kota Pekalongan Tahun 2018, dan lain-lain. Terakhir, kategori tidak efektif memiliki persentase sejumlah 0%. Rincian data distribusi frekuensi efektivitas PAD Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada lampiran 4.

3. Serapan anggaran Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2017-2022 memiliki nilai terendah 0,75 atau setara dengan 75% berada pada Kota Salatiga tahun 2017, sedangkan nilai terbesarnya sebesar 0,96 atau setara 96% berada pada Kabupaten Banjarnegara tahun 2020. Nilai rata-rata serapan anggaran sebesar 0,9027 atau setara dengan 90,27%. Hal ini merepresentasikan pencapaian pada penggunaan dana yang telah dialokasikan untuk membiayai kegiatan tertentu. Serapan dana tersebut menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan secara optimal untuk

mencapai tujuan tertentu yang harapannya dapat membuat kesejahteraan masyarakat meningkat. Serapan dana yang tinggi juga penting untuk dilakukan penilaian yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penggunaan dananya. Selain itu, serapan dana yang tinggi dan tidak melebihi 100% dianggap tidak adanya pemborosan anggaran. Standar deviasi sebesar 0,03985 atau setara dengan 3,985%. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, hal itu menunjukkan bahwa variabel serapan anggaran memiliki data yang tidak bervariasi.

4. Indeks pembangunan manusia Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2017-2022 memiliki nilai terendah 0,65 atau setara dengan 65% berada pada Kabupaten Brebes tahun 2017 dengan kriteria *Sedang*, sedangkan nilai terbesarnya sebesar 0,84 atau setara 84% berada pada Kota Salatiga tahun 2022 sebesar 84,35% dengan kriteria *Sangat Tinggi*. Nilai rata-rata indeks pembangunan manusia sebesar 0,7237 atau setara dengan 72,37%. Indeks pembangunan manusia yang tinggi diharapkan memiliki kualitas hidup yang lebih baik yang terbentuk dari angka harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Hal tersebut akan menjadikan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai yang pada akhirnya akan membuat pembangunan secara berkelanjutan. Standar deviasi sebesar 0,04467 atau setara dengan 4,467%. Dengan demikian,

dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, hal itu menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia memiliki data yang tidak bervariasi.



Sumber : Data diolah, 2024

Gambar 4.3

Persentase Distribusi Frekuensi IPM Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022

Berdasarkan data gambar diatas, dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi IPM dengan kategori sangat tinggi memiliki persentase dengan jumlah 9% dimana pada daerah seperti Kota Magelang Tahun 2022, Kota Salatiga Tahun 2017 – 2022, Kota Semarang Tahun 2017 – 2022, dan lain-lain. Kategori tinggi memiliki persentase 54% dan berada pada daerah seperti Kabupaten Banyumas Tahun 2017 – 2022, Kabupaten Boyolali Tahun 2017 – 2022, Kabupaten Cilacap Tahun 2021 – 2022, dan seterusnya. Sedangkan untuk kriteria IPM dengan kategori sedang, memiliki persentase sejumlah 37% dan berada pada daerah seperti Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022, Kabupaten Batang

Tahun 2017 – 2022, Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2022, dan lain-lain. Terakhir, kategori rendah memiliki persentase sejumlah 0%. Rincian data distribusi frekuensi IPM Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada lampiran 6.

4.3. Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel dalam penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis dalam berbagai periode waktu. Penelitian ini menggunakan derajat desentralisasi, efektivitas PAD, serapan anggaran sebagai variabel dependen dan indeks Pembangunan manusia sebagai variabel independen. Estimasi model regresi dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, *random effect model*. Berikut merupakan aplikasi dari ketiga model regresi. Untuk menentukan model mana yang akan digunakan, peneliti melakukan pengujian dengan melakukan seperti *uji chow*, *uji hausman*, *uji lagrange multiplier*.

Tabel 4. 2
Pengujian Model

Pengujian	Hasil	Kesimpulan
<i>Uji Chow</i>	Prob. > 0,05	<i>Common Effect Model</i>
	Prob. < 0,05	<i>Fixed Effect Model</i>
<i>Uji Hausman</i>	Prob. > 0,05	<i>Random Effect Model</i>
	Prob. < 0,05	<i>Fixed Effect Model</i>
<i>Uji Lagrange Multiplier (LM Test)</i>	Prob. > 0,05	<i>Common Effect Model</i>
	Prob. < 0,05	<i>Random Effect Model</i>

Berdasarkan tabel lampiran 6, pada baris Cross-section Chi-square nilai Prob. Adalah $0,0000 < 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*. Tahap selanjutnya, dilakukan pengujian hausman. Berdasarkan tabel lampiran 7, pada baris Cross-section random nilai Prob. adalah $0,0000 < 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*. Berdasarkan uji Chow model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* dan berdasarkan uji Hausman model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* sehingga ditetapkan model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model* dan tidak perlu melakukan *Uji Lagrange Multiplier (LM Test)*. Model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model*.

4.4. Pengujian Hipotesis

Tabel 4. 3
Pengujian Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,643571	0,021503	29,92872	0,0000
Derajat Desentralisasi	0,131318	0,027618	4,754792	0,0000
Efektivitas PAD	0,004967	0,005940	0,836141	0,4042
Serapan Anggaran	0,055231	0,022429	2,462438	0,0148

Sumber : *output e-views*

Uji hipotesis adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengevaluasi validitas suatu pernyataan atau asumsi tentang populasi berdasarkan data dari sampel. Prosedur ini mencakup penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, lalu melakukan analisis untuk menentukan apakah ada cukup bukti dalam data untuk menolak hipotesis nol.

Setelah menggunakan beberapa tahap pengujian, maka uji hipotesis menggunakan model *Fixed Effect Model*. Berikut merupakan hasil dan pembahasan pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

1. Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian adalah derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022. Hasil pengujian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dikarenakan nilai prob. sebesar $0,0000 < 0,05$. Koefisien regresi sebesar 0,131318 sehingga derajat desentralisasi berpengaruh secara positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Menurut Azis & Husna (2021) pemberian otonomi yang lebih besar dan desentralisasi yang telah diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten dan Kota saat ini, membuka kesempatan bagi mereka untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Rasio derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi, 2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan

Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022. Hal tersebut berarti bahwa derajat desentralisasi merupakan bagian penting dalam pemerintahan kaitannya dengan indeks pembangunan manusia. Derajat desentralisasi ini merujuk pada sejauh mana pemerintah daerah turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, dapat membuat layanan publik meningkat karna adanya pengelolaan sumber daya yang optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian (Winarni et al., 2022), (Gian & Arif, 2022), (Astuti & Mispiyanti, 2020).

Berdasarkan teori keuangan publik, dapat dilihat bahwa pada derajat desentralisasi dapat memberikan keleluasaan pada daerah otonom yang membuat pemerintah daerah tanggap dalam merespons kebutuhan masyarakat sekitar. Jika kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik maka kualitas layanan publik akan meningkat hingga sehingga berkontribusi dalam peningkatan IPM. Sejalan dengan teori keuangan publik, teori *stewardship* juga menekankan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Desentralisasi dapat membuat pemerintah daerah mengambil keputusan lebih bijak karena pemerintah daerah langsung mengetahui akan kondisi masyarakat didaerah. Adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat membuat proses pembangunan menjadi efektif. Adanya proses pembangunan yang efektif akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan IPM akan terus meningkat.

2. Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022. Hasil pengujian menunjukkan bahwa efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dikarenakan nilai prob. sebesar $0,4042 > 0,05$. Koefisien regresi sebesar 0,004967 sehingga efektivitas PAD tidak berpengaruh secara positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022. Hal ini berarti antara efektivitas PAD dengan indeks pembangunan manusia tidak ditemukan hubungan atau pengaruh yang signifikan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan-kemungkinan. Sejalan dengan penelitian (Habbe, 2021) yang menyatakan bahwa efektivitas PAD gagal meningkatkan IPM dan menurunkan kemiskinan. Begitu pula penelitian Astuti & Mispiyanti (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Akan tetapi, temuan ini tidak sejalan dengan

temuan (Zein & Septiani, 2024) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efektivitas berpengaruh dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia., (Siregar, 2023) menyatakan bahwa efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap IPM, dan (Khairudin et al., 2020) menyatakan bahwa efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Secara teori keuangan publik, jika pendapatan asli daerah tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan anggaran tidak terdistribusi dengan merata. Pembangunan yang ada kemungkinan kurang tepat sasaran. Kualitas pelayanan publik dirasa menjadi kurang efisien. Akibatnya, program-program yang telah direncanakan kurang memberikan manfaat yang pada akhirnya gagal menaikkan IPM. Sedangkan menurut teori *stewardship* ada kemungkinan bahwa masyarakat kurang memiliki kepercayaan kepada pemerintah daerah sebagai *steward*. Pemerintah daerah ada kemungkinan kurang optimal dalam mengelola sumber daya yang ada sehingga pelayanan publik belum maksimal. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat belum dapat tercapai dengan baik. Hal tersebut membuat efektivitas PAD tidak berpengaruh secara positif terhadap IPM.

3. Pengaruh Serapan Anggaran terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah serapan anggaran berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022. Hasil pengujian menunjukkan bahwa serapan anggaran berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dikarenakan nilai prob. sebesar $0,0148 < 0,05$. Koefisien regresi sebesar 0,055231 sehingga serapan anggaran berpengaruh secara positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serapan anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022. Sejalan penelitian Rahim et al. (2023) yang menyatakan bahwa belanja pendidikan dan belanja kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Tidak sejalan dengan penelitian (Sutono, 2022) yang menyatakan bahwa penyerapan belanja pemda tidak memiliki pengaruh signifikan pada IPM, sedangkan penyerapan belanja pempus berpengaruh signifikan pada IPM.

Teori keuangan publik dalam kaitannya serapan anggaran menjelaskan bahwa anggaran dana yang efektif dan efisien dapat

dialokasikan secara tepat dan berkontribusi untuk pembangunan masyarakat. Jika anggaran terserap dengan baik, maka kualitas pelayanan publik dapat meningkat, hal tersebut akan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut teori *stewardship*, anggaran dana yang dikelola pemerintah secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat dapat mendukung program-program pembangunan berkelanjutan. Pemerintah selalu mengawal anggaran dan belanja supaya digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan tepat guna dan sasaran. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat melalui IPM.

4.5. Pembahasan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi yang tinggi memberikan pemerintah daerah lebih banyak kebebasan dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, pemerintah daerah dapat melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tingkat desentralisasi yang tinggi juga membantu pemerintah dalam mengalokasikan anggaran secara efektif, yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Program pembangunan yang berfokus pada masyarakat dapat memberikan dampak positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Hasil analisis data selanjutnya menunjukkan bahwa efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengevaluasi alokasi dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Berbagai alternatif perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Selain itu, pemerintah daerah harus menetapkan prioritas program yang berorientasi pada aspek-aspek yang dapat mendongkrak indeks pembangunan manusia, seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam merancang program pembangunan daerah, kolaborasi dengan masyarakat sangat penting agar program yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Terakhir, analisis data pada penelitian ini menunjukkan serapan anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022. Pemerintah harus merencanakan dan memastikan alokasi anggaran dengan tepat agar serapan anggaran tersebut dapat optimal. Ini berimplikasi bahwa peningkatan serapan anggaran dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh derajat desentralisasi, efektivitas PAD, serapan anggaran terhadap indeks pembangunan manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022. Teori yang digunakan ialah teori keuangan publik dan *stewardship*. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Derajat desentralisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022. Semakin tinggi tingkat derajat desentralisasi, maka tingkat indeks pembangunan manusia akan semakin tinggi.
2. Efektivitas PAD tidak berpengaruh secara positif terhadap indeks pembangunan manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022.
3. Serapan anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022. Semakin tinggi tingkat serapan anggaran, maka tingkat indeks pembangunan manusia akan semakin tinggi.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari terdapat beberapa keterbatasan dalam proses penelitian ini. Harapannya, untuk penelitian di masa yang akan datang mungkin bisa dapat diperbaiki. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari Pemerintah Kota dan Kabupaten satu provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah. Untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat meneliti pada lingkup yang lebih luas.
2. Variabel independen dalam penelitian ini ialah derajat desentralisasi, efektivitas PAD, serapan anggaran dan terkait ukuran kinerja keuangan, masih banyak variabel lain yang bisa untuk diteliti seperti kemandirian keuangan daerah, ketergantungan keuangan daerah, efisiensi PAD. Sedangkan untuk variabel dependen terkait kesejahteraan masyarakat yang digunakan ialah indeks pembangunan manusia, untuk penelitian di masa yang akan datang mungkin bisa menambah variabel lain seperti kemiskinan dan pengangguran.

5.3. Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian yang membuktikan bahwa derajat desentralisasi dan serapan anggaran menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan untuk meningkatkan indikator indeks pembangunan

manusia maka pemerintah diharapkan mengoptimalkan langkah strategis dalam membuat manajemen keuangan. Hal ini akan menjadi kontribusi yang efektif dan efisien dalam operasionalisasi. Derajat desentralisasi dan manajemen serapan anggaran merupakan dua faktor kunci dalam meningkatkan IPM. Desentralisasi memberikan kekuatan dan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk merespon kebutuhan lokal, sementara serapan anggaran yang efektif memastikan bahwa investasi dalam pembangunan manusia dilakukan dengan optimal. Kombinasi dari keduanya dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas hidup masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan IPM.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman terkait hubungan antara kinerja keuangan yang dijabarkan dalam derajat desentralisasi, efektivitas PAD, dan serapan anggaran terhadap indeks pembangunan manusia.

5.4. Saran

Berdasarkan kesimpulan, keterbatasan dan implikasi, maka saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut.

1. Penelitian yang akan datang diharapkan memperluas populasi dan menambah sampel dalam melakukan penelitiannya.

2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lainnya terkait dengan kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan model dan metode analisis data lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrabei, A. M., Jawabreh, O., & Saleh, M. M. A. (2023). Accounting Information and Role It on Financial Reports Quality in Jordanian Hotels, and Social Performance as a Mediating Effect. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(7), 2271–2279. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.180732>
- Anto, L. O., & Yusran, I. N. (2023). Article history : Keywords : Internal Control System ; Information Technology ; Applying of Accounting Standards ; Human Resources Competence ; The Role of Internal Auditors ; Quality of Financial Reports . *Technology, Information; Competence, Human Resources, January*, 1–40.
- Aprianto, N. E. K. (2021). *Evaluasi Kebijakan Keuangan Publik dalam Tinjauan Islam*. 4(1), 28–42.
- Astuti, S., & Mispiyanti. (2020). Effects of Regional Government Financial Performance on Economic Growth, Unemployment, Poverty, and Human Development Index. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.31002/rak.v5i1.2714>
- Aswar, K., Ermawati1, & Julianto, W. (2021). Implementation of accrual accounting by the Indonesian central government: An investigation of social factors. *Public and Municipal Finance*, 10(1), 151–163. [https://doi.org/10.21511/pmf.10\(1\).2021.12](https://doi.org/10.21511/pmf.10(1).2021.12)
- Azfirmawarman, D., Magriast, L., & Yulhendri. (2023). Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia (Kajian Perubahan Metodologi Penghitungan). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(5), 117–125.
- Azis, R. F., & Husna, N. (2021). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018-2020. *Kelitbangan*, 9(3), 1–16.
- Basuki, A. T. (2021). Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi dengan Penggunaan EvIEWS). In *PT Rajagrafindo Persada*.
- Batin, M. H. (2022). *Keuangan Publik* (Edisi Pert). Kencana.

- Bjurstrøm, K. H. (2020). Principal–Agent or Principal–Steward: How Ministry–Agency Relations Condition the Impact of Performance Management in the Steering of Government Agencies. *Public Performance and Management Review*, 43(5), 1053–1077. <https://doi.org/10.1080/15309576.2020.1739087>
- BPS. (2024). *Badan Pusat Statistik Jawa Tengah*. <https://jateng.bps.go.id/>
- Cohen, S., Manes Rossi, F., Mamakou, X., & Brusca, I. (2022). Financial accounting information presented with infographics: does it improve financial reporting understandability? *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 34(6), 263–295. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-11-2021-0163>
- Cozby, P. C. (2015). Methods in Behavioral Research. In *Behaviour Research and Therapy* (Vol. 17, Issue 5). McGraw-Hill Education. [https://doi.org/10.1016/0005-7967\(79\)90091-3](https://doi.org/10.1016/0005-7967(79)90091-3)
- Darwis, H., Ohorella, R. W. U., & Zainuddin, Z. (2022). Transparency and accountability of regional financial management: Accessibility of financial statements as a moderation. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 11(9), 243–249. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i9.2066>
- Dollery, B., & Drew, J. (2023). New South Wales State Government Failure? An Empirical Analysis of the Cootamundra Gundagai Regional Council Forced Merger. *Public Administration Quarterly*, 47(2), 200–222. <https://doi.org/10.37808/paq.47.2.6>
- Elmashtawy, A., Haat, M. H. C., Ismail, S., & Almaqtari, F. A. (2024). Audit committee effectiveness and audit quality: the moderating effect of joint audit. *Arab Gulf Journal of Scientific Research*, 42(3). <https://doi.org/10.1108/AGJSR-09-2022-0202>
- Fadillah, F., Erwita, F., Azzahra, F., Jambak, L. R., & Yolanda, R. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan PDRB terhadap Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. *Jurnal Sosiohumaniora Kodepena Information Center for Indonesian Social Sciences*, 4(1), 21–27.
- Fitriani, Y., Yuliani, N. L., & Purwantini, A. H. P. (2021). Antecedents of Accountability

- Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang). In *Proceeding of The 14th University Research Colloquium 2021* (pp. 331–346). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap.
- Ghazali, R. (2023). Menyoal Pengelolaan Keuangan Publik dalam penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 44(2), 71–81. <https://doi.org/10.47313/jidb.v44i2.2667>
- Gian, R. W., & Arif. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 3(2), 88–100. <https://doi.org/10.36423/jumper.v3i2.902>
- Habbe, A. H. (2021). The Exploration of Effect of Financial Performance to the Public Welfare. *International Journal of Law and Management*, 63(5), 464–478. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-09-2017-0222>
- Hamimah, & Zulkarnain. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 1(2), 11–18. <https://doi.org/10.30812/rekan.v1i2.922>
- Haustein, E., & C. Lorson, P. (2021). Transparency of local government financial statements: Analyzing citizens' perceptions. *Financial Accountability and Management*, 39(2), 375–393. <https://doi.org/10.1111/faam.12353>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 1 (2022). <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- Jaelani, A., & Hanim, T. F. (2020). Sustainability of Public Finance During The COVID-19 Outbreaks in Indonesia. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 12(1), 109–123. <https://doi.org/10.24235/amwal.v1i1.6557>
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. UMSU Press.
- Kamaroellah, R. A., & Syafik, M. (2022). Analysis of Regional Budget Management Performance at Regional Finance Agency of Pamekasan

- Regency. *The Winners*, 23(2), 103–112.
<https://doi.org/10.21512/tw.v23i2.6871>
- Khairudin, Aminah, & Redaputri, A. P. (2020). Pentingnya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Akuntabel*, 17(1), 148–151.
<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/article/view/7336%0A>
- Khikmah, Z., Sarfiah, S. N., & Prasetyanto, P. K. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap IPM di Pulau Sulawesi Tahun 2011-2018. *Directory Journal of Economic*, 2(4), 1127–1142.
- Krah, R., & Mertens, G. (2020). Democracy and financial transparency of local governments in Sub-Saharan Africa. *Meditari Accountancy Research*, 28(4), 681–699. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-08-2019-0539>
- Kuntadi, C., Juwanto, C., & Zakaria, M. I. (2023). Factors Affecting the Preparation of Government Financial Statements: Application of Government Accounting Standards, Utilization of Information Technology, and Internal Control System (Literature Review of State Financial Management). *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 4(2), 326–333.
<https://doi.org/10.38035/dijefa.v4i2.1851>
- Lan, Y., & Tang, Y. (2020). Application of Computer Accounting System in Internal Control of Enterprise Accounting. *Journal of Physics: Conference Series*, 1693(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1693/1/012007>
- Maharani, A. Z., Annundi, S. A., Wulansari, W. W., Susanti, I. A., & Ardhiarisca, O. (2024). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 65–74.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Makmur, M., Patra, A. D. A., & Wahida, A. (2021). *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Serapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palopo)*.

- Marhamah, & Indriastuti, A. (2024). Implementation of Government Accounting Standards, the Role of Internal Audit and Apparatus Competence on the Quality of Accounting Information at the Regional Drinking Water Company (PDAM) Tirta BeningPat District. *Jurnal STIE Semarang*, 16(2), 181–188.
- Munfarida, S., & Priyojadmiko, E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Rasio Efektivitas dan Rasio Kemandirian terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Andalas Management Review*, 4(2), 45–59.
- Mutiha, A. H. (2017). The Effect of Financial Ratio to Human Development Index (Based on the Study in Districts and Cities of West Java). *KnE Social Sciences*, 3(2018), 848–861. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.2812>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pramartha, I. M. A., Aryasa, I. P. G. C. A., & Putra, I. K. (2023). Fiscal decentralization and human development index: examining the moderating effect of capital spending in Bali. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 6(1), 10–19. <https://doi.org/10.31940/jasafint.v6i1.10-19>
- Pramartha, I. M. A., Putra, G. S. A., & Putra, I. K. (2023). Human Development Index: Examining the Effect of Fiscal Decentralization and the Moderating Role of Private Investment. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 06(09), 4627–4633. <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i9-54>
- Putri, D. L. (2024, July 4). Daftar provinsi paling miskin di Pulau Jawa 2024. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/04/133000765/daftar-provinsi-paling-miskin-di-jawa-2024-diy-urutan-teratas?page=all#:~:text=Provinsi paling miskin kedua di,di Indonesia periode Maret 2023.>
- Rahim, M., Suriadi, L. O., Muthalib, A. A., Alwi, S., & Saenong, Z. (2023). Dampak Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 205–215.
- Rahma, F., Yunarsi, Fatmala, W., & Yulianti, D. (2022). Pengaruh Kinerja

- Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 55–61.
- Rahma, F., Yunarsi, Wilda, & Dewi Yulianti. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 13–19. <https://doi.org/10.57151/jeko.v1i2.9>
- Ramadhanti, H. (2022). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 – 2019. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.4626>
- Rangkuty, D. M., Yusuf, M., & Pasaribu, R. A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(2), 41–52. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2640>
- Rindiyan, & Mubaraq, A. (2023). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan Ekonomi di provinsi kalimantan barat. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, 1, 491–500.
- Sahlan, E., Yusuf, Y., & Susanto, D. (2022). Pengaruh Pendataan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 4(1), 18–22. <https://doi.org/10.58258/jihad.v4i1.4592>
- Salameh, R., Hyasat, E., Lutfi, K., Alnabulsi, Z., & Al-Quran, A. (2022). The Impact of Meeting the International Financial Reporting Standards (IFRS) No. 15 on the Quality of Financial Reports in the Jordanian Construction Companies. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19(15), 1206–1214. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.106>
- Sari, D. T., Khusna, N. I., & Wulandari, F. (2023). Analisis Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah: Suatu Kajian Berdasarkan Faktor Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Lokasi Dan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, 8(1), 37. <https://doi.org/10.26737/jpipsi.v8i1.3978>
- Sari, F. N. G., & Riharjo, I. B. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah

- Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(8).
- Shawl, S., & Nayak, K. M. (2023). Financial Statement Analysis: Case Study of Apar Industries. *Asian Journal of Management Cases*, 1–7. <https://doi.org/10.1177/09728201231169131>
- Shoup, C. S. (2017). *Public Finance*. Routledge.
- Siregar, H. A. (2023). Aspek Kinerja Keuangan Daerah yang Berdampak pada Pembangunan Manusia di Daerah Pemekaran. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 13(2), 157–167. <https://doi.org/10.37859/jae.v13i2.5530>
- Solikin, A., Badriatin, T., Marino, W. S., Defitri, S. Y., Sitepu, H. V., Abdullah, Rachmawati, D. W., Siregar, R. T., Dasman, S., Varlitya, C. R., & Sari, N. P. (2024). *Keuangan Publik* (E. Damayanti (ed.)). Widina Media Utama.
- Sutono, I. A. (2022). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3(2), 150–168. <https://doi.org/10.33105/jmp.v3i2.463>
- Sutono, I. A., & Keuangan, K. (2022). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3(2), 150–168. <https://doi.org/10.33105/jmp.v3i2.463>
- Syahara, H., Fauziah, S. S., Wibowo, T. J. A., & Anwar, S. (2024). Implementasi dan Peran Teori Stewardship pada Konteks Penelitian Akuntansi : Studi Literatur. *Jurnal Karimah Tauhid*, 3(4), 4716–4734.
- Trisno, T. U., Munajat, & Oktarina, Y. (2022). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(8). <https://doi.org/10.53488/jba.v7i02.128>
- Ulfa, R. F. U., & Yuliafitri, I. (2023). Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Studi Kasus Pada Kabupaten Bandung (2017-2022). *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 2(3), 301–315. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i3.346>
- Urip Wardoyo, D., Satrio Wicaksono, T., & Difara anugrah putri, T. (2022). Historical Perspective dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. *Jurnal Ilmiah*

Multidisiplin, 1(2), 137–140.

- Wahyuni, F., & Ali, H. (2024). Pengaruh Kemandirian Keuangan, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Keuangan terhadap Pembangunan Daerah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(3).
- Widiyanto, P. P., & Isnowati, S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi. *6(2)*, 239–249. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/5426>
- Winarni, E., Handayani, R., & Soleh, A. (2022). Analisis Hubungan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(1), 270. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.369>
- Wulandari, & Rahmadani, I. (2024). The Application of Government Accounting Standards in Social Service Financial Reports. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(1), 127–134. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i1.2453>
- Yanti, N. S., Made, A., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4455>
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Zein, M. H. M., & Septiani, S. (2024). The Effect of Financial Performance on Capital Expenditure, Economic Growth, Human Development Index, and Poverty. *General Management*, 25(200), 188–202. <https://doi.org/10.47750/QAS/25.200.20>
- Zhang, E. (2022). Accounting and statecraft in China: Accrual accounting for effective government rather than efficient market. *Critical Perspectives on Accounting*, January. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2022.102419>
- Zineelabidine, M., Nafssi, F., & Ayass, H. (2024). The Determinants of the Efficiency of Microfinance Institutions in Africa. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(318). <https://doi.org/10.3390/jrfm17080318>

Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Cakrawala-Repository IMWI*, 3(1), 61–74.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

No	Kabupaten / Kota	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota					
		Indeks Pembangunan Manusia					
		2022	2021	2020	2019	2018	2017
	Provinsi Jawa Tengah	72,79	72,16	71,87	71,73	71,12	70,52
1	Kabupaten Cilacap	70,99	70,42	69,95	69,98	69,56	68,9
2	Kabupaten Banyumas	73,17	72,44	71,98	71,96	71,3	70,75
3	Kabupaten Purbalingga	69,54	69,15	68,97	68,99	68,41	67,72
4	Kabupaten Banjarnegara	68,61	67,86	67,45	67,34	66,54	65,86
5	Kabupaten Kebumen	70,79	70,05	69,81	69,60	68,8	68,29
6	Kabupaten Purworejo	73,6	72,98	72,68	72,50	71,87	71,31
7	Kabupaten Wonosobo	68,89	68,43	68,22	68,27	67,81	66,89
8	Kabupaten Magelang	70,85	70,12	69,87	69,87	69,11	68,39
9	Kabupaten Boyolali	74,97	74,4	74,25	73,80	73,22	72,64
10	Kabupaten Klaten	76,95	76,12	75,56	75,29	74,79	74,25
11	Kabupaten Sukoharjo	77,94	77,13	76,98	76,84	76,07	75,56
12	Kabupaten Wonogiri	71,04	70,49	70,25	69,98	69,37	68,66
13	Kabupaten Karanganyar	76,58	75,99	75,86	75,89	75,54	75,22
14	Kabupaten Sragen	74,65	74,08	73,95	73,43	72,96	72,4
15	Kabupaten Grobogan	70,97	70,41	69,87	69,86	69,32	68,87
16	Kabupaten Blora	69,95	69,37	68,84	68,65	67,95	67,52
17	Kabupaten Rembang	71	70,43	70,02	70,15	69,46	68,95
18	Kabupaten Pati	73,14	72,28	71,77	71,35	70,71	70,12

19	Kabupaten Kudus	75,89	75,16	75	74.94	74,58	73,84
20	Kabupaten Jepara	73,15	72,36	71,99	71.88	71,38	70,79
21	Kabupaten Demak	73,36	72,57	72,22	71.87	71,26	70,41
22	Kabupaten Semarang	74,67	74,24	74,1	74.14	73,61	73,2
23	Kabupaten Temanggung	70,77	69,88	69,57	69.56	68,83	68,34
24	Kabupaten Kendal	73,19	72,5	72,29	71.97	71,28	70,62
25	Kabupaten Batang	69,45	68,92	68,65	68.42	67,86	67,35
26	Kabupaten Pekalongan	70,81	70,11	69,63	69.71	68,97	68,4
27	Kabupaten Pemalang	67,19	66,56	66,32	66.32	65,67	65,04
28	Kabupaten Tegal	69,53	68,79	68,39	68.24	67,33	66,44
29	Kabupaten Brebes	67,03	66,32	66,11	66.12	65,68	64,86
30	Kota Magelang	80,39	79,43	78,99	78.80	78,31	77,84
31	Kota Surakarta	83,08	82,62	82,21	81.86	81,46	80,85
32	Kota Salatiga	84,35	83,6	83,14	83.12	82,41	81,68
33	Kota Semarang	84,08	83,55	83,05	83.19	82,72	82,01
34	Kota Pekalongan	75,9	75,4	74,98	74.77	74,24	73,77
35	Kota Tegal	76,15	75,52	75,07	74.93	74,44	73,95

Sumber : BPS (2024)

Lampiran 2. Rata-Rata IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada Tahun 2017-2022

Peringkat	Kabupaten/Kota	Rata-Rata IPM Tahun 2017-2022
	Provinsi Jawa Tengah	71,70
1	Kota Semarang	83,10
2	Kota Salatiga	83,05
3	Kota Surakarta	82,04
4	Kota Magelang	78,99
5	Kabupaten Sukoharjo	76,74
6	Kabupaten Karanganyar	75,84
7	Kabupaten Klaten	75,53
8	Kota Tegal	75,01
9	Kabupaten Kudus	74,89
10	Kota Pekalongan	74,84
11	Kabupaten Semarang	73,96
12	Kabupaten Boyolali	73,90
13	Kabupaten Sragen	73,61
14	Kabupaten Purworejo	72,49
15	Kabupaten Kendal	71,98
16	Kabupaten Demak	71,96
17	Kabupaten Jepara	71,93
18	Kabupaten Banyumas	71,93
19	Kabupaten Pati	71,60
20	Kabupaten Rembang	69,97
21	Kabupaten Cilacap	69,97
22	Kabupaten Wonogiri	69,96
23	Kabupaten Grobogan	69,89
24	Kabupaten Magelang	69,67
25	Kabupaten Pekalongan	69,58
26	Kabupaten Kebumen	69,55
27	Kabupaten Temanggung	69,48
28	Kabupaten Purbalingga	68,80
29	Kabupaten Blora	68,73
30	Kabupaten Batang	68,45
31	Kabupaten Tegal	68,10
32	Kabupaten Wonosobo	68,05
33	Kabupaten Banjarnegara	67,28
34	Kabupaten Pemalang	66,16
35	Kabupaten Brebes	66,00

Sumber : Data diolah, 2024

Distribusi Frekuensi Derajat Desentralisasi Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022

Kriteria	Jumlah
Sangat Rendah	1
Rendah	151
Sedang	45
Cukup Tinggi	7
Tinggi	5
Sangat Tinggi	1

Sumber : Data diolah, 2024

Lampiran 3. Rincian Data Efektivitas PAD Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022

Kota-Kabupaten	Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Total Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil Daerah	Persentase Efektivitas PAD	Kriteria
Kabupaten Banjarnegara	2017	297.485.382.003	277.400.917.500	107,24%	Sangat Efektif
Kabupaten Banjarnegara	2018	235.994.436.137	218.725.264.000	107,90%	Sangat Efektif
Kabupaten Banjarnegara	2019	257.700.650.110	246.977.637.000	104,34%	Sangat Efektif
Kabupaten Banjarnegara	2020	238.638.994.321	236.466.681.466	100,92%	Sangat Efektif
Kabupaten Banjarnegara	2021	313.830.623.336	295.321.105.282	106,27%	Sangat Efektif
Kabupaten Banjarnegara	2022	284.507.773.825	288.099.257.918	98,75%	Cukup Efektif
Kabupaten Banyumas	2017	619.701.627.380	571.033.167.996	108,52%	Sangat Efektif
Kabupaten Banyumas	2018	648.326.914.035	630.770.637.593	102,78%	Sangat Efektif
Kabupaten Banyumas	2019	686.805.512.326	661.437.503.568	103,84%	Sangat Efektif
Kabupaten Banyumas	2020	668.211.148.299	633.302.968.814	105,51%	Sangat Efektif
Kabupaten Banyumas	2021	761.991.440.173	710.179.509.944	107,30%	Sangat Efektif
Kabupaten Banyumas	2022	822.685.992.142	864.151.372.260	95,20%	Cukup Efektif
Kabupaten Batang	2017	219.807.128.307	219.356.311.813	100,21%	Sangat Efektif
Kabupaten Batang	2018	237.547.973.048	235.062.509.725	101,06%	Sangat Efektif
Kabupaten Batang	2019	245.836.087.092	249.192.603.844	98,65%	Cukup Efektif
Kabupaten Batang	2020	257.422.866.095,46	225.961.233.297	113,92%	Sangat Efektif
Kabupaten Batang	2021	322.789.372.917,64	273.916.141.117	117,84%	Sangat Efektif
Kabupaten Batang	2022	300.965.726.271,01	281.668.899.772	106,85%	Sangat Efektif
Kabupaten Blora	2017	280.042.019.102	268.303.892.156	104,37%	Sangat Efektif
Kabupaten Blora	2018	203.182.795.054	199.199.813.000	102,00%	Sangat Efektif
Kabupaten Blora	2019	246.863.066.484	218.052.934.811	113,21%	Sangat Efektif

Kabupaten Blora	2020	299.687.660.301	277.463.428.182	108,01%	Sangat Efektif
Kabupaten Blora	2021	326.770.477.077	262.245.392.980	124,60%	Sangat Efektif
Kabupaten Blora	2022	325.966.473.177	314.441.617.697	103,67%	Sangat Efektif
Kabupaten Boyolali	2017	388.014.897.386	362.931.489.000	106,91%	Sangat Efektif
Kabupaten Boyolali	2018	342.957.213.726	329.616.583.000	104,05%	Sangat Efektif
Kabupaten Boyolali	2019	395.431.863.402	364.528.449.000	108,48%	Sangat Efektif
Kabupaten Boyolali	2020	451.543.582.894	436.378.240.000	103,48%	Sangat Efektif
Kabupaten Boyolali	2021	514.970.001.433,95	384.120.843.000	134,06%	Sangat Efektif
Kabupaten Boyolali	2022	444.693.170.145	405.919.761.000	109,55%	Sangat Efektif
Kabupaten Brebes	2017	523.660.773.731,79	510.848.264.000	102,51%	Sangat Efektif
Kabupaten Brebes	2018	346.907.972.510,31	356.931.221.000	97,19%	Cukup Efektif
Kabupaten Brebes	2019	379.091.298.714,05	381.974.992.000	99,25%	Cukup Efektif
Kabupaten Brebes	2020	392.541.730.819,14	363.130.149.000	108,10%	Sangat Efektif
Kabupaten Brebes	2021	518.511.128.704,62	481.422.097.000	107,70%	Sangat Efektif
Kabupaten Brebes	2022	419.395.415.995,14	428.736.313.711	97,82%	Cukup Efektif
Kabupaten Cilacap	2017	648.091.381.096	612.077.977.866	105,88%	Sangat Efektif
Kabupaten Cilacap	2018	527.577.740.281	497.353.613.147	106,08%	Sangat Efektif
Kabupaten Cilacap	2019	574.276.795.303,59	553.906.636.361	103,68%	Sangat Efektif
Kabupaten Cilacap	2020	591.343.787.160,48	561.113.709.065	105,39%	Sangat Efektif
Kabupaten Cilacap	2021	739.133.833.863,79	653.354.304.152	113,13%	Sangat Efektif
Kabupaten Cilacap	2022	700.428.762.449,02	690.532.412.044	101,43%	Sangat Efektif
Kabupaten Demak	2017	309.612.407.201	283.670.499.000	109,15%	Sangat Efektif
Kabupaten Demak	2018	342.324.870.245	308.845.276.400	110,84%	Sangat Efektif
Kabupaten Demak	2019	407.400.540.994,55	377.428.931.462	107,94%	Sangat Efektif
Kabupaten Demak	2020	439.694.424.385,95	367.991.804.422	119,48%	Sangat Efektif

Kabupaten Demak	2021	445.010.135.308,79	405.271.709.834	109,81%	Sangat Efektif
Kabupaten Demak	2022	477.198.401.098,80	453.397.479.712	105,25%	Sangat Efektif
Kabupaten Grobogan	2017	440.456.238.668	440.891.892.189	99,90%	Cukup Efektif
Kabupaten Grobogan	2018	315.743.175.974	316.106.906.043	99,88%	Cukup Efektif
Kabupaten Grobogan	2019	344.559.032.450	337.422.005.222	102,12%	Sangat Efektif
Kabupaten Grobogan	2020	350.453.524.065	311.061.602.979	112,66%	Sangat Efektif
Kabupaten Grobogan	2021	424.186.340.266	346.675.272.708	122,36%	Sangat Efektif
Kabupaten Grobogan	2022	424.751.554.830	366.624.946.652	115,85%	Sangat Efektif
Kabupaten Jepara	2017	325.530.346.533	300.243.532.000	108,42%	Sangat Efektif
Kabupaten Jepara	2018	369.330.454.700	350.307.839.000	105,43%	Sangat Efektif
Kabupaten Jepara	2019	384.979.296.768	372.712.418.000	103,29%	Sangat Efektif
Kabupaten Jepara	2020	419.363.320.517	408.012.576.000	102,78%	Sangat Efektif
Kabupaten Jepara	2021	408.635.274.883	372.970.362.000	109,56%	Sangat Efektif
Kabupaten Jepara	2022	427.516.690.043	432.902.738.000	98,76%	Cukup Efektif
Kabupaten Karanganyar	2017	415.142.563.370	381.557.551.385	108,80%	Sangat Efektif
Kabupaten Karanganyar	2018	343.156.469.167	327.100.643.000	104,91%	Sangat Efektif
Kabupaten Karanganyar	2019	387.763.013.239	352.420.926.000	110,03%	Sangat Efektif
Kabupaten Karanganyar	2020	384.682.993.533	341.722.577.000	112,57%	Sangat Efektif
Kabupaten Karanganyar	2021	426.649.591.411,95	427.291.144.000	99,85%	Cukup Efektif
Kabupaten Karanganyar	2022	511.737.349.879,05	438.373.541.542	116,74%	Sangat Efektif
Kabupaten Kebumen	2017	443.608.862.461	437.343.224.000	101,43%	Sangat Efektif
Kabupaten Kebumen	2018	352.047.092.281,90	364.092.341.000	96,69%	Cukup Efektif
Kabupaten Kebumen	2019	409.163.433.329,68	406.995.982.000	100,53%	Sangat Efektif
Kabupaten Kebumen	2020	403.025.963.783,80	326.820.579.000	123,32%	Sangat Efektif
Kabupaten Kebumen	2021	472.017.087.115,00	398.974.820.000	118,31%	Sangat Efektif

Kabupaten Kebumen	2022	512.346.375.475,00	440.433.051.000	116,33%	Sangat Efektif
Kabupaten Kendal	2017	404.978.613.972	395.818.878.534	102,31%	Sangat Efektif
Kabupaten Kendal	2018	335.892.237.024	338.052.929.990	99,36%	Cukup Efektif
Kabupaten Kendal	2019	350.500.849.956	412.512.717.638	84,97%	Kurang Efektif
Kabupaten Kendal	2020	356.753.593.703	333.650.044.139	106,92%	Sangat Efektif
Kabupaten Kendal	2021	439.197.987.791	415.542.060.688	105,69%	Sangat Efektif
Kabupaten Kendal	2022	437.899.634.626,73	530.076.475.754	82,61%	Kurang Efektif
Kabupaten Klaten	2017	371.718.439.306	335.512.441.000	110,79%	Sangat Efektif
Kabupaten Klaten	2018	395.884.244.135	373.770.433.500	105,92%	Sangat Efektif
Kabupaten Klaten	2019	311.648.401.655,44	292.651.477.481	106,49%	Sangat Efektif
Kabupaten Klaten	2020	329.963.261.898	246.558.797.299	133,83%	Sangat Efektif
Kabupaten Klaten	2021	315.304.009.782	277.915.340.915	113,45%	Sangat Efektif
Kabupaten Klaten	2022	358.048.103.989	329.129.377.686	108,79%	Sangat Efektif
Kabupaten Kudus	2017	366.031.203.778	373.804.376.000	97,92%	Cukup Efektif
Kabupaten Kudus	2018	337.364.609.424	310.288.695.000	108,73%	Sangat Efektif
Kabupaten Kudus	2019	343.824.122.868	335.180.949.000	102,58%	Sangat Efektif
Kabupaten Kudus	2020	383.892.971.961	291.643.884.000	131,63%	Sangat Efektif
Kabupaten Kudus	2021	507.167.074.775	367.504.396.000	138,00%	Sangat Efektif
Kabupaten Kudus	2022	418.705.145.589,40	405.622.452.000	103,23%	Sangat Efektif
Kabupaten Magelang	2017	403.561.238.310	399.425.826.000	101,04%	Sangat Efektif
Kabupaten Magelang	2018	325.089.093.092	363.038.862.200	89,55%	Kurang Efektif
Kabupaten Magelang	2019	417.178.099.961	441.347.020.000	94,52%	Cukup Efektif
Kabupaten Magelang	2020	329.769.193.224	265.502.524.500	124,21%	Sangat Efektif
Kabupaten Magelang	2021	375.378.465.373	361.937.105.587	103,71%	Sangat Efektif
Kabupaten Magelang	2022	432.688.035.341	402.851.931.662	107,41%	Sangat Efektif

Kabupaten Pati	2017	449.821.345.800	416.966.354.000	107,88%	Sangat Efektif
Kabupaten Pati	2018	384.041.846.939	362.171.914.000	106,04%	Sangat Efektif
Kabupaten Pati	2019	363.997.151.178	359.242.879.000	101,32%	Sangat Efektif
Kabupaten Pati	2020	371.708.005.192	350.903.171.000	105,93%	Sangat Efektif
Kabupaten Pati	2021	388.644.537.358	336.586.717.000	115,47%	Sangat Efektif
Kabupaten Pati	2022	388.754.867.176	363.635.711.000	106,91%	Sangat Efektif
Kabupaten Pekalongan	2017	305.394.299.060,77	300.887.832.132	101,50%	Sangat Efektif
Kabupaten Pekalongan	2018	311.288.143.681,83	369.095.235.409	84,34%	Kurang Efektif
Kabupaten Pekalongan	2019	341.344.415.574,51	408.032.305.251	83,66%	Kurang Efektif
Kabupaten Pekalongan	2020	341.901.469.549,15	378.788.767.484	90,26%	Cukup Efektif
Kabupaten Pekalongan	2021	346.599.468.113,44	339.693.849.261	102,03%	Sangat Efektif
Kabupaten Pekalongan	2022	342.971.185.262,55	423.607.425.138	80,96%	Kurang Efektif
Kabupaten Pemalang	2017	425.893.266.850	405.333.931.000	105,07%	Sangat Efektif
Kabupaten Pemalang	2018	300.481.887.079	275.431.369.000	109,10%	Sangat Efektif
Kabupaten Pemalang	2019	350.559.139.753	297.127.162.000	117,98%	Sangat Efektif
Kabupaten Pemalang	2020	328.375.466.698	292.672.718.000	112,20%	Sangat Efektif
Kabupaten Pemalang	2021	365.393.902.790	307.180.542.000	118,95%	Sangat Efektif
Kabupaten Pemalang	2022	349.130.621.188	345.755.988.000	100,98%	Sangat Efektif
Kabupaten Purbalingga	2017	355.859.003.583	347.907.007.000	102,29%	Sangat Efektif
Kabupaten Purbalingga	2018	282.679.019.517	274.721.620.000	102,90%	Sangat Efektif
Kabupaten Purbalingga	2019	305.996.806.188	282.795.073.000	108,20%	Sangat Efektif
Kabupaten Purbalingga	2020	313.618.688.781	256.466.315.000	122,28%	Sangat Efektif
Kabupaten Purbalingga	2021	377.882.022.370,39	289.814.522.000	130,39%	Sangat Efektif
Kabupaten Purbalingga	2022	306.197.569.020	282.365.183.000	108,44%	Sangat Efektif
Kabupaten Purworejo	2017	298.606.494.653	269.067.899.709,60	110,98%	Sangat Efektif

Kabupaten Purworejo	2018	286.971.590.024	278.952.386.723	102,87%	Sangat Efektif
Kabupaten Purworejo	2019	280.396.155.599,65	294.463.075.397	95,22%	Cukup Efektif
Kabupaten Purworejo	2020	304.800.202.905	261.999.024.780	116,34%	Sangat Efektif
Kabupaten Purworejo	2021	438.264.776.270	304.742.154.959	143,81%	Sangat Efektif
Kabupaten Purworejo	2022	330.274.511.807,79	361.220.899.343	91,43%	Cukup Efektif
Kabupaten Rembang	2017	300.319.284.807,04	308.606.440.109,60	97,31%	Cukup Efektif
Kabupaten Rembang	2018	296.676.436.263,15	304.351.906.094	97,48%	Cukup Efektif
Kabupaten Rembang	2019	308.445.489.137,31	310.601.592.071	99,31%	Cukup Efektif
Kabupaten Rembang	2020	326.670.124.350,50	292.142.773.423	111,82%	Sangat Efektif
Kabupaten Rembang	2021	404.100.646.579,46	353.442.306.291,53	114,33%	Sangat Efektif
Kabupaten Rembang	2022	353.094.781.382,53	374.171.127.000	94,37%	Cukup Efektif
Kabupaten Semarang	2017	417.417.848.831	363.698.928.000	114,77%	Sangat Efektif
Kabupaten Semarang	2018	383.475.678.134	372.861.719.000	102,85%	Sangat Efektif
Kabupaten Semarang	2019	429.011.081.257	407.019.494.000	105,40%	Sangat Efektif
Kabupaten Semarang	2020	442.528.167.447,97	398.198.472.000	111,13%	Sangat Efektif
Kabupaten Semarang	2021	575.748.297.606	409.582.260.000	140,57%	Sangat Efektif
Kabupaten Semarang	2022	480.302.999.649	488.521.609.000	98,32%	Cukup Efektif
Kabupaten Sragen	2017	404.569.404.722	401.875.430.000	100,67%	Sangat Efektif
Kabupaten Sragen	2018	334.303.284.344	327.508.593.000	102,07%	Sangat Efektif
Kabupaten Sragen	2019	368.325.799.601	339.720.770.005	108,42%	Sangat Efektif
Kabupaten Sragen	2020	394.464.906.604	309.617.040.945	127,40%	Sangat Efektif
Kabupaten Sragen	2021	537.265.408.211	391.963.733.958	137,07%	Sangat Efektif
Kabupaten Sragen	2022	364.484.878.491	354.270.068.908	102,88%	Sangat Efektif
Kabupaten Sukoharjo	2017	464.567.409.857	391.127.036.000	118,78%	Sangat Efektif
Kabupaten Sukoharjo	2018	433.485.481.219	348.388.683.000	124,43%	Sangat Efektif

Kabupaten Sukoharjo	2019	458.742.223.869	359.679.145.000	127,54%	Sangat Efektif
Kabupaten Sukoharjo	2020	469.540.567.890	342.723.550.000	137,00%	Sangat Efektif
Kabupaten Sukoharjo	2021	528.354.094.902	420.628.098.600	125,61%	Sangat Efektif
Kabupaten Sukoharjo	2022	495.282.321.890	393.788.841.068	125,77%	Sangat Efektif
Kabupaten Tegal	2017	375.531.165.351	370.098.012.000	101,47%	Sangat Efektif
Kabupaten Tegal	2018	372.282.676.055	418.830.489.000	88,89%	Kurang Efektif
Kabupaten Tegal	2019	436.003.392.413,29	449.974.699.000	96,90%	Cukup Efektif
Kabupaten Tegal	2020	439.931.567.174,60	408.838.286.000	107,61%	Sangat Efektif
Kabupaten Tegal	2021	591.004.284.313	469.765.165.000	125,81%	Sangat Efektif
Kabupaten Tegal	2022	531.150.278.017,50	475.177.918.000	111,78%	Sangat Efektif
Kabupaten Temanggung	2017	308.466.748.340	307.083.335.256	100,45%	Sangat Efektif
Kabupaten Temanggung	2018	252.019.934.778	261.511.805.053	96,37%	Cukup Efektif
Kabupaten Temanggung	2019	278.313.775.793	260.464.334.440	106,85%	Sangat Efektif
Kabupaten Temanggung	2020	307.488.084.365	251.969.585.751	122,03%	Sangat Efektif
Kabupaten Temanggung	2021	363.128.342.571	271.757.079.716	133,62%	Sangat Efektif
Kabupaten Temanggung	2022	308.705.886.109	305.939.643.656	100,90%	Sangat Efektif
Kabupaten Wonogiri	2017	333.840.434.905	300.922.361.334	110,94%	Sangat Efektif
Kabupaten Wonogiri	2018	269.032.427.619	239.351.096.082	112,40%	Sangat Efektif
Kabupaten Wonogiri	2019	287.221.631.013,15	261.603.471.132	109,79%	Sangat Efektif
Kabupaten Wonogiri	2020	274.293.129.950	230.501.783.422	119,00%	Sangat Efektif
Kabupaten Wonogiri	2021	241.300.072.883	209.572.712.714	115,14%	Sangat Efektif
Kabupaten Wonogiri	2022	332.811.150.760	293.020.148.253	113,58%	Sangat Efektif
Kabupaten Wonosobo	2017	228.017.473.938	210.138.740.720	108,51%	Sangat Efektif
Kabupaten Wonosobo	2018	226.819.478.601	212.079.482.339	106,95%	Sangat Efektif
Kabupaten Wonosobo	2019	238.371.743.591	227.435.357.864	104,81%	Sangat Efektif

Kabupaten Wonosobo	2020	251.724.091.045	208.649.963.773	120,64%	Sangat Efektif
Kabupaten Wonosobo	2021	339.745.535.241	238.073.145.205	142,71%	Sangat Efektif
Kabupaten Wonosobo	2022	264.942.660.020	236.196.772.997	112,17%	Sangat Efektif
Kota Magelang	2017	233.557.714.356	218.085.185.000	107,09%	Sangat Efektif
Kota Magelang	2018	249.877.424.347	225.916.332.000	110,61%	Sangat Efektif
Kota Magelang	2019	273.582.932.151	242.404.296.000	112,86%	Sangat Efektif
Kota Magelang	2020	290.756.816.510	240.421.207.000	120,94%	Sangat Efektif
Kota Magelang	2021	319.391.277.825	251.821.496.000	126,83%	Sangat Efektif
Kota Magelang	2022	377.367.945.305	326.375.068.556	115,62%	Sangat Efektif
Kota Pekalongan	2017	192.002.871.181	197.597.634.000	97,17%	Cukup Efektif
Kota Pekalongan	2018	179.224.408.698	199.813.870.000	89,70%	Kurang Efektif
Kota Pekalongan	2019	212.777.435.294	209.577.100.000	101,53%	Sangat Efektif
Kota Pekalongan	2020	229.867.935.361	172.993.386.000	132,88%	Sangat Efektif
Kota Pekalongan	2021	252.037.004.472	214.208.310.000	117,66%	Sangat Efektif
Kota Pekalongan	2022	263.475.949.166	255.833.693.000	102,99%	Sangat Efektif
Kota Salatiga	2017	220.243.361.132	188.391.649.000	116,91%	Sangat Efektif
Kota Salatiga	2018	208.926.057.032	209.772.712.000	99,60%	Cukup Efektif
Kota Salatiga	2019	236.086.898.372	221.089.796.000	106,78%	Sangat Efektif
Kota Salatiga	2020	219.539.400.332	197.768.282.000	111,01%	Sangat Efektif
Kota Salatiga	2021	280.684.937.797	237.406.216.000	118,23%	Sangat Efektif
Kota Salatiga	2022	240.959.878.632	218.644.038.938	110,21%	Sangat Efektif
Kota Semarang	2017	1.791.886.378.674	1.692.399.101.122	105,88%	Sangat Efektif
Kota Semarang	2018	1.821.274.103.250	1.811.352.288.800	100,55%	Sangat Efektif
Kota Semarang	2019	2.066.333.418.588	2.128.176.142.000	97,09%	Cukup Efektif
Kota Semarang	2020	2.024.537.808.307	1.889.598.813.000	107,14%	Sangat Efektif

Kota Semarang	2021	2.385.944.758.477	2.607.693.085.682	91,50%	Cukup Efektif
Kota Semarang	2022	2.545.991.747.658	2.533.643.457.802	100,49%	Sangat Efektif
Kota Surakarta	2017	527.544.224.971	492.503.909.101	107,11%	Sangat Efektif
Kota Surakarta	2018	525.125.554.686	505.328.290.741	103,92%	Sangat Efektif
Kota Surakarta	2019	546.020.008.117	567.757.960.983	96,17%	Cukup Efektif
Kota Surakarta	2020	492.776.208.640	402.870.481.279	122,32%	Sangat Efektif
Kota Surakarta	2021	560.579.997.086	514.200.704.362,46	109,02%	Sangat Efektif
Kota Surakarta	2022	647.440.585.332	740.143.061.392	87,48%	Kurang Efektif
Kota Tegal	2017	306.830.656.135	310.927.508.000	98,68%	Cukup Efektif
Kota Tegal	2018	275.021.448.594	305.484.446.000	90,03%	Cukup Efektif
Kota Tegal	2019	285.575.788.984,16	306.557.626.000	93,16%	Cukup Efektif
Kota Tegal	2020	266.580.982.102	276.449.199.000	96,43%	Cukup Efektif
Kota Tegal	2021	308.116.840.289	317.488.238.500	97,05%	Cukup Efektif
Kota Tegal	2022	340.054.969.233	381.994.269.000	89,02%	Kurang Efektif

Sumber : Data diolah, 2024

Distribusi Frekuensi Efektivitas PAD Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022

Kriteria	Jumlah
Tidak Efektif	0
Kurang Efektif	10
Cukup Efektif	34
Sangat Efektif	166

Sumber : Data diolah, 2024

Lampiran 4. Rincian Data Serapan Anggaran Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022

Kota-Kabupaten	Tahun	Akumulasi Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Persentase Serapan Anggaran
Kabupaten Banjarnegara	2017	2.178.832.342.905	2.355.088.391.000	92,52%
Kabupaten Banjarnegara	2018	2.119.096.683.202	2.231.879.520.000	94,95%
Kabupaten Banjarnegara	2019	2.123.033.797.431	2.238.530.915.000	94,84%
Kabupaten Banjarnegara	2020	2.030.532.397.495	2.106.432.380.778	96,40%
Kabupaten Banjarnegara	2021	2.042.019.297.374	2.160.173.950.756	94,53%
Kabupaten Banjarnegara	2022	2.039.210.930.404	2.163.664.553.750	94,25%
Kabupaten Banyumas	2017	2.594.781.048.739	2.970.705.685.118	87,35%
Kabupaten Banyumas	2018	2.741.141.898.312	2.992.068.958.452	91,61%
Kabupaten Banyumas	2019	2.800.699.579.326,40	3.039.862.159.819	92,13%
Kabupaten Banyumas	2020	2.686.475.021.852	2.994.158.086.819	89,72%
Kabupaten Banyumas	2021	2.805.089.012.738	3.235.472.225.568	86,70%
Kabupaten Banyumas	2022	2.951.373.406.074	3.278.251.982.204	90,03%
Kabupaten Batang	2017	1.247.084.578.565	1.354.480.921.155	92,07%
Kabupaten Batang	2018	1.396.497.214.776	1.493.802.913.801	93,49%
Kabupaten Batang	2019	1.431.034.432.119	1.575.889.543.741,58	90,81%
Kabupaten Batang	2020	1.349.573.485.518,19	1.528.720.277.802,86	88,28%
Kabupaten Batang	2021	1.440.336.907.917	1.583.495.924.837,13	90,96%
Kabupaten Batang	2022	1.455.011.002.798	1.611.075.729.405,77	90,31%
Kabupaten Blora	2017	1.975.921.281.358	2.087.573.699.546	94,65%
Kabupaten Blora	2018	2.110.687.561.459	2.197.084.738.439	96,07%
Kabupaten Blora	2019	2.195.598.035.903	2.321.157.984.406	94,59%

Kabupaten Blora	2020	2.101.653.287.754	2.218.621.748.586	94,73%
Kabupaten Blora	2021	2.107.411.081.809	2.253.012.610.632	93,54%
Kabupaten Blora	2022	2.388.662.897.703	2.567.920.444.798	93,02%
Kabupaten Boyolali	2017	1.787.133.997.452	1.924.110.055.000	92,88%
Kabupaten Boyolali	2018	1.859.493.312.917	1.977.942.404.000	94,01%
Kabupaten Boyolali	2019	1.997.991.916.522	2.080.212.215.000	96,05%
Kabupaten Boyolali	2020	1.972.664.326.304	2.103.106.716.000	93,80%
Kabupaten Boyolali	2021	1.887.765.660.348	2.008.538.369.000	93,99%
Kabupaten Boyolali	2022	2.094.174.043.489	2.203.752.490.000	95,03%
Kabupaten Brebes	2017	2.767.377.461.021,38	2.950.823.242.000	93,78%
Kabupaten Brebes	2018	2.281.596.326.765	2.491.905.993.000	91,56%
Kabupaten Brebes	2019	2.471.256.601.337	2.667.246.667.000	92,65%
Kabupaten Brebes	2020	2.260.042.195.634	2.433.227.386.000	92,88%
Kabupaten Brebes	2021	3.126.226.470.518,90	3.286.307.643.838	95,13%
Kabupaten Brebes	2022	3.091.285.559.556	3.280.909.475.579	94,22%
Kabupaten Cilacap	2017	3.014.110.475.842,01	3.247.867.779.720	92,80%
Kabupaten Cilacap	2018	2.985.422.839.102	3.260.826.228.955	91,55%
Kabupaten Cilacap	2019	2.779.740.306.711,20	3.062.812.635.876	90,76%
Kabupaten Cilacap	2020	2.607.739.427.660	2.955.015.432.437	88,25%
Kabupaten Cilacap	2021	3.329.814.716.679,80	3.543.157.686.542	93,98%
Kabupaten Cilacap	2022	3.402.035.620.730,27	3.592.381.590.709	94,70%
Kabupaten Demak	2017	1.655.418.381.539	1.768.975.469.200	93,58%
Kabupaten Demak	2018	1.702.389.136.934	1.855.849.008.777	91,73%
Kabupaten Demak	2019	1.899.488.390.627	2.075.285.689.910	91,53%

Kabupaten Demak	2020	1.849.147.363.773	2.024.518.192.012	91,34%
Kabupaten Demak	2021	1.898.629.991.637	2.081.110.521.532,50	91,23%
Kabupaten Demak	2022	2.046.866.928.108	2.196.244.148.319,29	93,20%
Kabupaten Grobogan	2017	2.127.940.209.859	2.343.404.799.288	90,81%
Kabupaten Grobogan	2018	1.968.732.976.648	2.157.261.395.470	91,26%
Kabupaten Grobogan	2019	2.131.118.477.310	2.284.724.826.565	93,28%
Kabupaten Grobogan	2020	2.090.600.816.851	2.191.976.531.865	95,38%
Kabupaten Grobogan	2021	2.428.631.673.540	2.594.450.125.721	93,61%
Kabupaten Grobogan	2022	2.687.129.832.388	2.853.656.553.384	94,16%
Kabupaten Jepara	2017	1.899.703.524.898	2.047.201.627.000	92,80%
Kabupaten Jepara	2018	1.953.640.728.788	2.063.115.947.000	94,69%
Kabupaten Jepara	2019	1.924.958.759.521	2.109.470.589.000	91,25%
Kabupaten Jepara	2020	1.903.049.903.846	2.148.309.819.992	88,58%
Kabupaten Jepara	2021	2.309.409.464.300	2.535.023.323.067	91,10%
Kabupaten Jepara	2022	2.429.312.218.030	2.621.977.599.331	92,65%
Kabupaten Karanganyar	2017	1.732.306.772.949	1.963.850.600.480	88,21%
Kabupaten Karanganyar	2018	1.743.713.707.303	1.945.181.992.000	89,64%
Kabupaten Karanganyar	2019	1.903.890.023.117	2.100.482.859.000	90,64%
Kabupaten Karanganyar	2020	1.750.519.736.124	1.902.284.591.000	92,02%
Kabupaten Karanganyar	2021	1.799.595.275.289	1.956.501.055.200	91,98%
Kabupaten Karanganyar	2022	1.846.792.220.976	1.977.393.633.157	93,40%
Kabupaten Kebumen	2017	2.113.132.464.285,34	2.360.199.300.000	89,53%
Kabupaten Kebumen	2018	2.145.847.613.126	2.356.684.399.000	91,05%
Kabupaten Kebumen	2019	2.246.525.240.727	2.437.268.559.000	92,17%

Kabupaten Kebumen	2020	2.138.579.092.380	2.298.321.076.000	93,05%
Kabupaten Kebumen	2021	2.779.840.698.100	2.958.061.909.000	93,98%
Kabupaten Kebumen	2022	2.191.867.028.425	2.378.432.595.000	92,16%
Kabupaten Kendal	2017	1.746.984.182.399	1.987.359.945.090	87,90%
Kabupaten Kendal	2018	1.806.153.332.142	2.002.806.180.617	90,18%
Kabupaten Kendal	2019	1.957.307.986.581	2.170.488.261.642	90,18%
Kabupaten Kendal	2020	1.646.014.921.056	1.860.888.449.313	88,45%
Kabupaten Kendal	2021	2.069.958.006.821	2.435.688.248.524	84,98%
Kabupaten Kendal	2022	2.499.014.019.249	2.777.433.177.946	89,98%
Kabupaten Klaten	2017	1.846.458.264.255,22	2.311.459.589.788	79,88%
Kabupaten Klaten	2018	1.906.017.589.489,88	2.256.817.387.277,98	84,46%
Kabupaten Klaten	2019	1.917.895.032.426,68	2.313.507.060.398,52	82,90%
Kabupaten Klaten	2020	1.820.342.899.284	2.188.110.038.816,28	83,19%
Kabupaten Klaten	2021	1.820.638.422.785	2.274.081.162.010,28	80,06%
Kabupaten Klaten	2022	1.873.841.539.069,28	2.362.991.387.745,28	79,30%
Kabupaten Kudus	2017	1.773.405.620.296	1.932.107.071.000	91,79%
Kabupaten Kudus	2018	1.719.107.548.945	1.892.755.440.000	90,83%
Kabupaten Kudus	2019	1.804.423.944.940	2.017.507.863.000	89,44%
Kabupaten Kudus	2020	1.644.224.043.281	1.877.461.556.390	87,58%
Kabupaten Kudus	2021	1.625.310.090.434	1.993.870.821.950	81,52%
Kabupaten Kudus	2022	1.962.911.141.278	2.311.821.389.364	84,91%
Kabupaten Magelang	2017	1.957.966.285.066	2.342.516.240.778	83,58%
Kabupaten Magelang	2018	1.957.114.127.802	2.244.964.665.885	87,18%
Kabupaten Magelang	2019	1.884.681.713.041	2.166.566.147.754	86,99%

Kabupaten Magelang	2020	1.636.641.956.482	1.903.610.290.787	85,98%
Kabupaten Magelang	2021	1.771.575.214.425	2.103.718.131.726	84,21%
Kabupaten Magelang	2022	2.570.326.001.677	2.864.668.786.188	89,73%
Kabupaten Pati	2017	2.071.726.133.897	2.297.162.479.000	90,19%
Kabupaten Pati	2018	2.118.304.525.311	2.355.985.796.000	89,91%
Kabupaten Pati	2019	2.156.608.822.527	2.374.634.104.000	90,82%
Kabupaten Pati	2020	2.053.158.413.693	2.179.553.062.000	94,20%
Kabupaten Pati	2021	1.955.956.398.112	2.123.377.795.000	92,12%
Kabupaten Pati	2022	1.997.374.330.022	2.146.906.150.000	93,04%
Kabupaten Pekalongan	2017	1.663.838.115.821,75	1.900.171.010.683	87,56%
Kabupaten Pekalongan	2018	1.819.039.472.364	2.062.904.740.959	88,18%
Kabupaten Pekalongan	2019	1.791.600.197.478	2.056.606.636.350	87,11%
Kabupaten Pekalongan	2020	1.665.608.487.935	1.892.562.287.982	88,01%
Kabupaten Pekalongan	2021	2.075.043.160.173	2.245.070.775.156	92,43%
Kabupaten Pekalongan	2022	2.123.953.846.361	2.346.793.933.623	90,50%
Kabupaten Pemalang	2017	1.896.830.515.438	2.135.329.325.000	88,83%
Kabupaten Pemalang	2018	1.900.327.954.512	2.204.687.976.000	86,19%
Kabupaten Pemalang	2019	2.102.044.770.019	2.415.423.818.000	87,03%
Kabupaten Pemalang	2020	2.184.827.392.908	2.321.919.329.635	94,10%
Kabupaten Pemalang	2021	2.026.616.790.669	2.183.940.326.000	92,80%
Kabupaten Pemalang	2022	2.034.549.676.370	2.220.152.355.000	91,64%
Kabupaten Purbalingga	2017	1.708.374.442.209	1.824.816.431.000	93,62%
Kabupaten Purbalingga	2018	1.596.511.126.300	1.762.959.505.000	90,56%
Kabupaten Purbalingga	2019	1.701.313.169.024	1.850.966.050.000	91,91%

Kabupaten Purbalingga	2020	1.500.418.873.732	1.613.481.567.000	92,99%
Kabupaten Purbalingga	2021	1.606.578.193.840,39	1.754.621.176.000	91,56%
Kabupaten Purbalingga	2022	1.714.438.611.980	1.823.907.942.000	94,00%
Kabupaten Purworejo	2017	1.773.135.401.455	1.887.626.016.114	93,93%
Kabupaten Purworejo	2018	1.680.531.555.419	1.807.304.216.273	92,99%
Kabupaten Purworejo	2019	1.681.554.060.429,82	1.778.533.029.974	94,55%
Kabupaten Purworejo	2020	1.598.638.305.094	1.701.476.393.017,83	93,96%
Kabupaten Purworejo	2021	2.135.478.213.580	2.296.267.754.041,83	93,00%
Kabupaten Purworejo	2022	2.347.131.165.050	2.552.545.806.500,83	91,95%
Kabupaten Rembang	2017	1.457.482.172.598,22	1.597.256.286.598,18	91,25%
Kabupaten Rembang	2018	1.464.320.909.614,36	1.561.292.212.018	93,79%
Kabupaten Rembang	2019	1.463.905.411.510,13	1.539.885.242.011,19	95,07%
Kabupaten Rembang	2020	1.425.834.550.259,20	1.493.626.825.553	95,46%
Kabupaten Rembang	2021	1.836.443.011.929	1.907.473.943.742,72	96,28%
Kabupaten Rembang	2022	1.991.790.018.142,71	2.232.003.097.935	89,24%
Kabupaten Semarang	2017	1.741.443.297.080,64	1.899.386.213.000	91,68%
Kabupaten Semarang	2018	1.880.355.549.568,60	2.054.290.906.000	91,53%
Kabupaten Semarang	2019	1.987.402.657.360	2.154.665.256.000	92,24%
Kabupaten Semarang	2020	1.860.724.759.138	2.021.271.238.000	92,06%
Kabupaten Semarang	2021	1.877.388.576.286	2.104.288.345.000	89,22%
Kabupaten Semarang	2022	2.181.792.971.608	2.412.852.965.000	90,42%
Kabupaten Sragen	2017	1.797.357.910.150	1.945.884.177.000	92,37%
Kabupaten Sragen	2018	1.874.045.302.081	2.087.545.111.418	89,77%
Kabupaten Sragen	2019	1.724.475.486.622	2.073.240.221.938	83,18%

Kabupaten Sragen	2020	1.784.669.428.617	2.036.072.161.690	87,65%
Kabupaten Sragen	2021	2.160.877.775.669	2.481.286.715.332	87,09%
Kabupaten Sragen	2022	1.954.064.181.992	2.335.146.454.625	83,68%
Kabupaten Sukoharjo	2017	1.581.523.010.006	2.011.075.275.000	78,64%
Kabupaten Sukoharjo	2018	1.740.840.296.519	1.975.489.848.000	88,12%
Kabupaten Sukoharjo	2019	1.776.147.006.513	2.112.858.325.000	84,06%
Kabupaten Sukoharjo	2020	1.727.809.331.309	2.035.445.880.000	84,89%
Kabupaten Sukoharjo	2021	1.756.972.447.254	2.022.353.558.000	86,88%
Kabupaten Sukoharjo	2022	1.696.793.753.977	1.900.041.942.902	89,30%
Kabupaten Tegal	2017	2.056.964.445.808	2.222.208.581.000	92,56%
Kabupaten Tegal	2018	2.127.372.729.068	2.304.909.079.000	92,30%
Kabupaten Tegal	2019	2.210.463.202.698,15	2.399.784.504.000	92,11%
Kabupaten Tegal	2020	2.010.868.784.570,52	2.211.813.962.000	90,91%
Kabupaten Tegal	2021	2.285.151.931.627	2.467.200.647.000	92,62%
Kabupaten Tegal	2022	2.207.928.241.237	2.439.307.565.000	90,51%
Kabupaten Temanggung	2017	1.428.210.413.585	1.500.216.453.579	95,20%
Kabupaten Temanggung	2018	1.327.852.634.858	1.439.447.580.077	92,25%
Kabupaten Temanggung	2019	1.459.984.620.331	1.564.535.576.518	93,32%
Kabupaten Temanggung	2020	1.366.917.712.451	1.485.469.623.391	92,02%
Kabupaten Temanggung	2021	1.877.969.167.294	2.053.340.949.247	91,46%
Kabupaten Temanggung	2022	1.958.748.409.806	2.163.271.983.090	90,55%
Kabupaten Wonogiri	2017	1.972.104.990.826,91	2.177.741.782.750	90,56%
Kabupaten Wonogiri	2018	1.914.884.382.844,28	2.111.348.357.621,00	90,69%
Kabupaten Wonogiri	2019	2.082.696.717.801,87	2.321.696.826.236,72	89,71%

Kabupaten Wonogiri	2020	1.902.671.657.801	2.128.710.539.561	89,38%
Kabupaten Wonogiri	2021	1.930.600.661.653	2.148.183.518.481	89,87%
Kabupaten Wonogiri	2022	1.887.400.132.560	2.115.922.244.385	89,20%
Kabupaten Wonosobo	2017	1.427.840.983.198	1.713.138.728.761	83,35%
Kabupaten Wonosobo	2018	1.576.536.848.054	1.791.320.117.735	88,01%
Kabupaten Wonosobo	2019	1.713.764.352.930	1.879.285.548.214	91,19%
Kabupaten Wonosobo	2020	1.536.908.827.915	1.690.404.565.316	90,92%
Kabupaten Wonosobo	2021	1.526.634.690.220	1.692.981.557.428	90,17%
Kabupaten Wonosobo	2022	1.674.857.583.547	1.792.611.015.194	93,43%
Kota Magelang	2017	878.847.479.147	1.075.062.418.000	81,75%
Kota Magelang	2018	936.685.044.170	1.065.723.224.000,00	87,89%
Kota Magelang	2019	994.598.919.912	1.092.438.518.000	91,04%
Kota Magelang	2020	798.353.191.714	1.008.741.538.000	79,14%
Kota Magelang	2021	935.047.734.177	1.136.283.529.894	82,29%
Kota Magelang	2022	1.039.501.502.733	1.180.160.601.291	88,08%
Kota Pekalongan	2017	924.172.718.082	1.016.990.454.000	90,87%
Kota Pekalongan	2018	883.184.894.707	980.002.459.000	90,12%
Kota Pekalongan	2019	954.397.012.827	1.050.112.414.000	90,89%
Kota Pekalongan	2020	944.840.460.675,56	1.012.737.890.000	93,30%
Kota Pekalongan	2021	962.091.792.004	1.041.206.081.000	92,40%
Kota Pekalongan	2022	1.031.090.188.444,02	1.090.187.786.000	94,58%
Kota Salatiga	2017	849.474.262.275	1.136.298.935.000	74,76%
Kota Salatiga	2018	923.538.238.485	1.187.171.790.000	77,79%
Kota Salatiga	2019	942.053.531.357	1.164.787.877.000	80,88%

Kota Salatiga	2020	944.296.168.940	1.095.361.041.000	86,21%
Kota Salatiga	2021	956.501.304.732	1.068.992.597.512	89,48%
Kota Salatiga	2022	931.871.471.274	1.046.299.128.242	89,06%
Kota Semarang	2017	4.327.958.389.741	4.758.710.546.195	90,95%
Kota Semarang	2018	4.505.423.372.044	4.785.871.389.218	94,14%
Kota Semarang	2019	1.054.761.429.772	1.127.005.683.601	93,59%
Kota Semarang	2020	4.126.379.066.760	4.374.945.712.985	94,32%
Kota Semarang	2021	4.764.045.946.156,89	5.336.565.925.505	89,27%
Kota Semarang	2022	4.871.946.697.040	5.218.296.302.859	93,36%
Kota Surakarta	2017	1.767.486.061.945	1.987.655.027.756,26	88,92%
Kota Surakarta	2018	1.913.787.493.276	2.090.933.683.155,17	91,53%
Kota Surakarta	2019	2.011.613.989.386	2.173.401.766.803,17	92,56%
Kota Surakarta	2020	1.638.665.726.421	1.885.698.744.826	86,90%
Kota Surakarta	2021	1.866.496.348.304	2.187.312.144.097,72	85,33%
Kota Surakarta	2022	2.087.823.395.600	2.459.474.822.361	84,89%
Kota Tegal	2017	1.016.537.313.307,51	1.191.685.254.000	85,30%
Kota Tegal	2018	916.079.821.600,05	1.139.447.448.000	80,40%
Kota Tegal	2019	1.045.904.713.031,18	1.234.473.491.000	84,72%
Kota Tegal	2020	1.047.896.931.383	1.184.533.886.000	88,46%
Kota Tegal	2021	1.089.705.697.276	1.242.182.214.088	87,73%
Kota Tegal	2022	1.127.738.112.539	1.211.017.610.761	93,12%

Sumber : Data diolah, 2024

Lampiran 5. Rincian Data IPM Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022

Kota-Kabupaten	Tahun	IPM	Kriteria
Kabupaten Banjarnegara	2017	65,86%	Sedang
Kabupaten Banjarnegara	2018	66,54%	Sedang
Kabupaten Banjarnegara	2019	67,34%	Sedang
Kabupaten Banjarnegara	2020	67,45%	Sedang
Kabupaten Banjarnegara	2021	67,86%	Sedang
Kabupaten Banjarnegara	2022	68,61%	Sedang
Kabupaten Banyumas	2017	70,75%	Tinggi
Kabupaten Banyumas	2018	71,30%	Tinggi
Kabupaten Banyumas	2019	71,96%	Tinggi
Kabupaten Banyumas	2020	71,98%	Tinggi
Kabupaten Banyumas	2021	72,44%	Tinggi
Kabupaten Banyumas	2022	73,17%	Tinggi
Kabupaten Batang	2017	67,35%	Sedang
Kabupaten Batang	2018	67,86%	Sedang
Kabupaten Batang	2019	68,42%	Sedang
Kabupaten Batang	2020	68,65%	Sedang
Kabupaten Batang	2021	68,92%	Sedang
Kabupaten Batang	2022	69,45%	Sedang
Kabupaten Blora	2017	67,62%	Sedang
Kabupaten Blora	2018	67,95%	Sedang
Kabupaten Blora	2019	68,65%	Sedang
Kabupaten Blora	2020	68,84%	Sedang
Kabupaten Blora	2021	69,37%	Sedang
Kabupaten Blora	2022	69,95%	Sedang
Kabupaten Boyolali	2017	72,64%	Tinggi
Kabupaten Boyolali	2018	73,22%	Tinggi
Kabupaten Boyolali	2019	73,80%	Tinggi
Kabupaten Boyolali	2020	74,25%	Tinggi
Kabupaten Boyolali	2021	74,40%	Tinggi
Kabupaten Boyolali	2022	74,97%	Tinggi
Kabupaten Brebes	2017	64,86%	Sedang
Kabupaten Brebes	2018	65,68%	Sedang
Kabupaten Brebes	2019	66,12%	Sedang
Kabupaten Brebes	2020	66,11%	Sedang
Kabupaten Brebes	2021	66,32%	Sedang
Kabupaten Brebes	2022	67,03%	Sedang
Kabupaten Cilacap	2017	68,90%	Sedang
Kabupaten Cilacap	2018	69,56%	Sedang

Kabupaten Cilacap	2019	69,98%	Sedang
Kabupaten Cilacap	2020	69,95%	Sedang
Kabupaten Cilacap	2021	70,42%	Tinggi
Kabupaten Cilacap	2022	70,99%	Tinggi
Kabupaten Demak	2017	70,41%	Tinggi
Kabupaten Demak	2018	71,26%	Tinggi
Kabupaten Demak	2019	71,87%	Tinggi
Kabupaten Demak	2020	72,22%	Tinggi
Kabupaten Demak	2021	72,57%	Tinggi
Kabupaten Demak	2022	73,36%	Tinggi
Kabupaten Grobogan	2017	68,87%	Sedang
Kabupaten Grobogan	2018	69,32%	Sedang
Kabupaten Grobogan	2019	69,86%	Sedang
Kabupaten Grobogan	2020	69,87%	Sedang
Kabupaten Grobogan	2021	70,41%	Tinggi
Kabupaten Grobogan	2022	70,97%	Tinggi
Kabupaten Jepara	2017	70,79%	Tinggi
Kabupaten Jepara	2018	71,38%	Tinggi
Kabupaten Jepara	2019	71,88%	Tinggi
Kabupaten Jepara	2020	71,99%	Tinggi
Kabupaten Jepara	2021	72,36%	Tinggi
Kabupaten Jepara	2022	73,15%	Tinggi
Kabupaten Karanganyar	2017	75,22%	Tinggi
Kabupaten Karanganyar	2018	75,54%	Tinggi
Kabupaten Karanganyar	2019	75,89%	Tinggi
Kabupaten Karanganyar	2020	75,86%	Tinggi
Kabupaten Karanganyar	2021	75,99%	Tinggi
Kabupaten Karanganyar	2022	76,58%	Tinggi
Kabupaten Kebumen	2017	68,29%	Sedang
Kabupaten Kebumen	2018	68,80%	Sedang
Kabupaten Kebumen	2019	69,60%	Sedang
Kabupaten Kebumen	2020	69,81%	Sedang
Kabupaten Kebumen	2021	70,05%	Tinggi
Kabupaten Kebumen	2022	70,79%	Tinggi
Kabupaten Kendal	2017	70,62%	Tinggi
Kabupaten Kendal	2018	71,28%	Tinggi
Kabupaten Kendal	2019	71,97%	Tinggi
Kabupaten Kendal	2020	72,29%	Tinggi
Kabupaten Kendal	2021	72,50%	Tinggi
Kabupaten Kendal	2022	73,19%	Tinggi
Kabupaten Klaten	2017	74,25%	Tinggi
Kabupaten Klaten	2018	74,79%	Tinggi

Kabupaten Klaten	2019	75,29%	Tinggi
Kabupaten Klaten	2020	75,56%	Tinggi
Kabupaten Klaten	2021	76,12%	Tinggi
Kabupaten Klaten	2022	76,95%	Tinggi
Kabupaten Kudus	2017	73,84%	Tinggi
Kabupaten Kudus	2018	74,58%	Tinggi
Kabupaten Kudus	2019	74,94%	Tinggi
Kabupaten Kudus	2020	75,00%	Tinggi
Kabupaten Kudus	2021	75,16%	Tinggi
Kabupaten Kudus	2022	75,89%	Tinggi
Kabupaten Magelang	2017	68,39%	Sedang
Kabupaten Magelang	2018	69,11%	Sedang
Kabupaten Magelang	2019	69,87%	Sedang
Kabupaten Magelang	2020	69,87%	Sedang
Kabupaten Magelang	2021	70,12%	Tinggi
Kabupaten Magelang	2022	70,85%	Tinggi
Kabupaten Pati	2017	70,12%	Tinggi
Kabupaten Pati	2018	70,71%	Tinggi
Kabupaten Pati	2019	71,35%	Tinggi
Kabupaten Pati	2020	71,77%	Tinggi
Kabupaten Pati	2021	72,28%	Tinggi
Kabupaten Pati	2022	73,14%	Tinggi
Kabupaten Pekalongan	2017	68,40%	Sedang
Kabupaten Pekalongan	2018	68,97%	Sedang
Kabupaten Pekalongan	2019	69,71%	Sedang
Kabupaten Pekalongan	2020	69,63%	Sedang
Kabupaten Pekalongan	2021	70,11%	Tinggi
Kabupaten Pekalongan	2022	70,81%	Tinggi
Kabupaten Pemalang	2017	65,04%	Sedang
Kabupaten Pemalang	2018	65,67%	Sedang
Kabupaten Pemalang	2019	66,32%	Sedang
Kabupaten Pemalang	2020	66,32%	Sedang
Kabupaten Pemalang	2021	66,56%	Sedang
Kabupaten Pemalang	2022	67,19%	Sedang
Kabupaten Purbalingga	2017	67,72%	Sedang
Kabupaten Purbalingga	2018	68,41%	Sedang
Kabupaten Purbalingga	2019	68,99%	Sedang
Kabupaten Purbalingga	2020	68,97%	Sedang
Kabupaten Purbalingga	2021	69,15%	Sedang
Kabupaten Purbalingga	2022	69,54%	Sedang
Kabupaten Purworejo	2017	71,31%	Tinggi
Kabupaten Purworejo	2018	71,87%	Tinggi

Kabupaten Purworejo	2019	72,50%	Tinggi
Kabupaten Purworejo	2020	72,68%	Tinggi
Kabupaten Purworejo	2021	72,98%	Tinggi
Kabupaten Purworejo	2022	73,60%	Tinggi
Kabupaten Rembang	2017	68,95%	Sedang
Kabupaten Rembang	2018	69,46%	Sedang
Kabupaten Rembang	2019	70,15%	Tinggi
Kabupaten Rembang	2020	70,02%	Tinggi
Kabupaten Rembang	2021	70,43%	Tinggi
Kabupaten Rembang	2022	71,00%	Tinggi
Kabupaten Semarang	2017	73,20%	Tinggi
Kabupaten Semarang	2018	73,61%	Tinggi
Kabupaten Semarang	2019	74,14%	Tinggi
Kabupaten Semarang	2020	74,10%	Tinggi
Kabupaten Semarang	2021	74,24%	Tinggi
Kabupaten Semarang	2022	74,67%	Tinggi
Kabupaten Sragen	2017	72,40%	Tinggi
Kabupaten Sragen	2018	72,96%	Tinggi
Kabupaten Sragen	2019	73,43%	Tinggi
Kabupaten Sragen	2020	73,95%	Tinggi
Kabupaten Sragen	2021	74,08%	Tinggi
Kabupaten Sragen	2022	74,65%	Tinggi
Kabupaten Sukoharjo	2017	75,56%	Tinggi
Kabupaten Sukoharjo	2018	76,07%	Tinggi
Kabupaten Sukoharjo	2019	76,84%	Tinggi
Kabupaten Sukoharjo	2020	76,98%	Tinggi
Kabupaten Sukoharjo	2021	77,13%	Tinggi
Kabupaten Sukoharjo	2022	77,94%	Tinggi
Kabupaten Tegal	2017	66,44%	Sedang
Kabupaten Tegal	2018	67,33%	Sedang
Kabupaten Tegal	2019	68,24%	Sedang
Kabupaten Tegal	2020	68,39%	Sedang
Kabupaten Tegal	2021	68,79%	Sedang
Kabupaten Tegal	2022	69,53%	Sedang
Kabupaten Temanggung	2017	68,34%	Sedang
Kabupaten Temanggung	2018	68,83%	Sedang
Kabupaten Temanggung	2019	69,56%	Sedang
Kabupaten Temanggung	2020	69,57%	Sedang
Kabupaten Temanggung	2021	69,88%	Sedang
Kabupaten Temanggung	2022	70,77%	Tinggi
Kabupaten Wonogiri	2017	68,66%	Sedang
Kabupaten Wonogiri	2018	69,37%	Sedang

Kabupaten Wonogiri	2019	69,98%	Sedang
Kabupaten Wonogiri	2020	70,25%	Tinggi
Kabupaten Wonogiri	2021	70,49%	Tinggi
Kabupaten Wonogiri	2022	71,04%	Tinggi
Kabupaten Wonosobo	2017	66,89%	Sedang
Kabupaten Wonosobo	2018	67,81%	Sedang
Kabupaten Wonosobo	2019	68,27%	Sedang
Kabupaten Wonosobo	2020	68,22%	Sedang
Kabupaten Wonosobo	2021	68,43%	Sedang
Kabupaten Wonosobo	2022	68,89%	Sedang
Kota Magelang	2017	77,84%	Tinggi
Kota Magelang	2018	78,31%	Tinggi
Kota Magelang	2019	78,80%	Tinggi
Kota Magelang	2020	78,99%	Tinggi
Kota Magelang	2021	79,43%	Tinggi
Kota Magelang	2022	80,39%	Sangat Tinggi
Kota Pekalongan	2017	73,77%	Tinggi
Kota Pekalongan	2018	74,24%	Tinggi
Kota Pekalongan	2019	74,77%	Tinggi
Kota Pekalongan	2020	74,98%	Tinggi
Kota Pekalongan	2021	75,40%	Tinggi
Kota Pekalongan	2022	75,90%	Tinggi
Kota Salatiga	2017	81,68%	Sangat Tinggi
Kota Salatiga	2018	82,41%	Sangat Tinggi
Kota Salatiga	2019	83,12%	Sangat Tinggi
Kota Salatiga	2020	83,14%	Sangat Tinggi
Kota Salatiga	2021	83,60%	Sangat Tinggi
Kota Salatiga	2022	84,35%	Sangat Tinggi
Kota Semarang	2017	82,01%	Sangat Tinggi
Kota Semarang	2018	82,72%	Sangat Tinggi
Kota Semarang	2019	83,19%	Sangat Tinggi
Kota Semarang	2020	83,05%	Sangat Tinggi
Kota Semarang	2021	83,55%	Sangat Tinggi
Kota Semarang	2022	84,08%	Sangat Tinggi
Kota Surakarta	2017	80,85%	Sangat Tinggi
Kota Surakarta	2018	81,46%	Sangat Tinggi
Kota Surakarta	2019	81,86%	Sangat Tinggi
Kota Surakarta	2020	82,21%	Sangat Tinggi
Kota Surakarta	2021	82,62%	Sangat Tinggi
Kota Surakarta	2022	83,08%	Sangat Tinggi
Kota Tegal	2017	73,93%	Tinggi
Kota Tegal	2018	74,44%	Tinggi

Kota Tegal	2019	74,93%	Tinggi
Kota Tegal	2020	75,07%	Tinggi
Kota Tegal	2021	75,52%	Tinggi
Kota Tegal	2022	76,15%	Tinggi

Sumber : Data diolah, 2024

**Distribusi Frekuensi IPM Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah
Tahun 2017 – 2022**

Kriteria	Jumlah
Sangat Tinggi	19
Tinggi	113
Sedang	78
Rendah	0

Sumber : Data diolah, 2024

Lampiran 6. Hasil Uji Chow

Effects Test		Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F		62,338261	(34,172)	0,0000
Cross-section Chi-square		543,788238	34	0,0000
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,838134	0,046697	17,94849	0,0000
Derajat Desentralisasi	0,472512	0,025385	18,61395	0,0000
Efektivitas PAD	0,027517	0,015432	1,783138	0,0760
Serapan Anggaran	-0,259162	0,045088	-5,747867	0,0000

Sumber : *output e-views*

Lampiran 7. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	66,560553	3	0,0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
Derajat Desentralisasi	0,131318	0,214324	0,000162	0,0000
Efektivitas PAD	0,004967	0,000344	0,000001	0,0000
Serapan Anggaran	0,055231	0,032036	0,000019	0,0000

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,643571	0,021503	29,92872	0,0000
Derajat Desentralisasi	0,131318	0,027618	4,754792	0,0000
Efektivitas PAD	0,004967	0,005940	0,836141	0,4042
Serapan Anggaran	0,055231	0,022429	2,462438	0,0148

Sumber : *output e-views*